



**KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK
DALAM NOVEL *TANAH API*
KARYA S. JAI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra

Oleh

**Nama : Anton Setyo Wibowo
NIM : 2150405021
Prodi : Sastra Indonesia
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2010

SARI

Wibowo, Anton Setyo 2010. *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Tanah Api karya S. Jai*. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh. Doyin, M.Si. Pembimbing II: U'um Qomariah, S.Pd., M.Hum.
Kata Kunci: S Jai, Tanah Api, Novel

Novel merupakan pengejawantahan kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Oleh karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian kehidupan dari masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya. *Tanah Api* merupakan reportase singkat pengarang di wilayah Jakarta sebagai pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik yang menegangkan.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai? (2) Faktor apa yang menyebabkan konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai?

Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan didukung teori-teori konflik dan teori-teori politik. Sumber data penelitian ini berasal dari novel *Tanah Api* karya S. Jai. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Dalam hal ini penggunaan teknik deskriptif lebih ditekankan pada analisis konflik sosial dan konflik politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai dengan mengkorelasikan kehidupan masyarakat. Kemudian, penelitian ini mencoba memberi gambaran dan uraian yang lebih rinci tentang hubungan-hubungan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai.

Di dalam novel *Tanah Api* terdapat fase-fase penting dalam kesejarahan politik Indonesia, yaitu: dari masa pemerintahan Kolonial Belanda sampai Reformasi. Dalam fase tersebut, pergulatan politik Indonesia mengalami pasang surut dan perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh konflik-konflik politik yang terjadi pada masa-masa itu. Lebih lanjut, di dalam novel tersebut, tema-tema mengenai pergolakan politik golongan sangat dikedepankan. Pergolakan ini muncul sebagai akibat dari perbedaan ideologi kelompok-kelompok politik yang ada di Indonesia.

Pergolakan-pergolakan politik yang ditampilkan dalam novel *Tanah Api* merupakan konflik antara kaum elit politik dan pemerintahan yang cenderung memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mementingkan kedudukannya sendiri dengan kekuasaan yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto pada saat itu harus tumbang karena adanya pergerakan reformasi. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru tidak serta merta mengubah Indonesia menjadi lebih baik, akan tetapi praktik-praktik korupsi masih saja ada pada era reformasi hal inilah yang dianggap tradisi buruk bangsa Indonesia, bahwa korupsi sepertinya sudah menjadi budaya di Indonesia.

Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hendaknya bisa dijadikan dasar untuk penelitian mengenai masalah sosial dan politik selanjutnya, dan bisa dikembangkan lagi dengan cara penelitian langsung ke lapangan.

NOV 1



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.

hari : Kamis

tanggal : 16 Desember 2010

Panitia Ujian,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Rustono, M.Hum.
NIP 195801271983031003

Suseno, S.Pd., M.A.
NIP 197805142003121002

Penguji I,

Dra. L. M Budiyati, M. Pd.
NIP 194512301976032001

Penguji II,

Penguji III,

U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum.
NIP 198202122006042002

Drs. Mukh. Doyin, M. Si
NIP 196506121994121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Desember 2010

Anton Setyo Wibowo
NIM 2150405021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra).
- Pelajarilah semua hal yang anda bisa, kapan pun, dan dari siapa pun. Pasti akan tiba waktunya anda memetik buah dari apa yang anda kerjakan. (Anton Setyo Wibowo.).

Persembahan :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas samudera kasih yang kalian tumpahkan untukku.
- Kakakku, Retno Andriyati terima kasih atas dukungan dan doanya.
- Keluarga besar H. A Nasiri
- Almamaterku

PRAKATA

Segala keindahan hanya dimiliki Allah, Sang Maha Kaya dengan kejutan-kejutan warna kehidupan. Dan dari-Nya pula, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan dan juga kebanggaan.

Tiada hati yang kecil ini mampu menyelesaikan semuanya tanpa bantuan, dorongan, motivasi, dan selaut ilmu yang ditumpahkan kepada penulis dari banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Unnes.
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Mukh Doyin, M.Si selaku pembimbing I, dengan senyum yang mengembang selalu sabar membimbing saya.
4. U'um Qomariyah, S.Pd., M.Hum selaku pembimbing II, dengan semangat mudanya yang memacu saya untuk terus berusaha.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
6. Bapak Amir S.Pd dan Ibu Daryati, selaku orang tua dan sumber segala pengalaman hidup serta inspirasi saya.
7. Isti, pengusir segala dahaga dalam hidup saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat tersulam satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi almamater tercinta dan bermanfaat bagi pembaca serta pemerhati sastra guna perkembangan keilmuan sastra di masa yang akan datang.

Semarang, Desember 2010

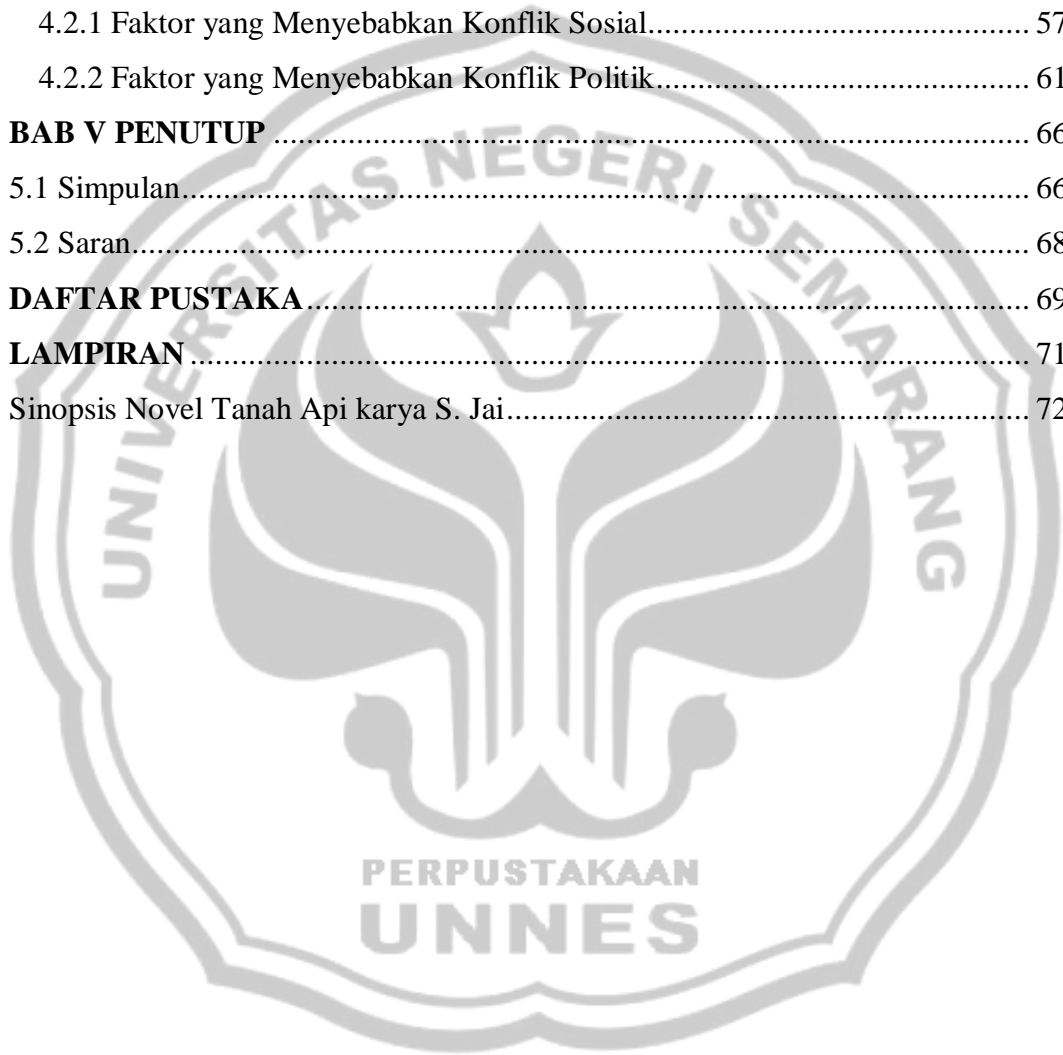
Penulis



DAFTAR ISI

SARI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORETIS	10
2.1 Sosiologi Sastra.....	10
2.2 Konflik dalam Karya Sastra	14
2.3 Pandangan tentang Konflik Sosial dan Politik	17
2.3.1 Konflik Sosial.....	20
2.3.2 Konflik Politik.....	21
2.4 Penyebab Konflik Sosial dan Politik	28
2.4.1 Penyebab Konflik Sosial.....	28
2.4.2 Penyebab Konflik Politik.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Sasaran Penelitian	36
3.3 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Konflik Sosial dan Politik dalam Novel <i>Tanah Api</i> Karya S. Jai.....	38
4.1.1 Konflik Sosial.....	39
4.1.2 Konflik Politik	47
4.1.2.1 Tipe Konflik.....	50

4.1.2.2 Struktur Konflik	51
4.1.2.3 Tujuan Konflik.....	52
4.1.2.4 Intensitas Konflik.....	54
4.1.3 Pengaturan Konflik.....	56
4.2 Faktor yang Menyebabkan Konflik Sosial dan Konflik Politik dalam Novel <i>Tanah Api</i> Karya S. Jai	57
4.2.1 Faktor yang Menyebabkan Konflik Sosial.....	57
4.2.2 Faktor yang Menyebabkan Konflik Politik.....	61
BAB V PENUTUP	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71
Sinopsis Novel <i>Tanah Api</i> karya S. Jai.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karya sastra merupakan susunan pengalaman. Dalam hal ini berarti bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup pengarangnya. Sumardjo dan Saini (1997: 3) berpendapat bahwa karya sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya karya sastra diciptakan oleh pengarang berdasarkan pengalaman, pikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinannya. Hal-hal tersebutlah yang diolah pengarang dengan menggunakan kemahirannya dalam berkreasi atas potensi estetis bahasa. Kemahiran dalam mengaplikasikan ungkapan pribadi inilah yang membedakan pengarang dengan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, membaca sebuah karya sastra maka kita akan berhadapan pada bentuk pengalaman atau pemikiran baru yang ditawarkan seorang pengarang.

Sebagaimana diketahui, pengarang memiliki karakteristik yang unik dalam memandang persoalan-persoalan hidup dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan problem yang terjadi di masyarakat yang mana pengarang sendiri berada di dalamnya. Jiwa yang selalu gelisah, benturan antar nilai akibat kompleksitas cara memandang atas berbagai persoalan kehidupan, serta perbedaan cara melihat persoalan

kehidupan tersebut dengan pandangan masyarakat di sekitarnya, merupakan sebuah karakteristik umum yang menghinggapi seorang pengarang karya sastra. Segala perbedaan antara pengarang dengan masyarakat pada umumnya itu menyebabkan terciptanya produk kreatif bernama karya sastra. Kreativitas yang dihasilkan dalam sebuah karya sastra inilah yang membuat adanya kebaruan dalam karya sastra. Bahwa karya sastra adalah hasil kreativitas dan kreativitas itu adalah proses pengungkapan yang akan menghasilkan satu inovasi. Sebab bagaimanapun juga, karya sastra merupakan bentuk refleksi dari realitas kehidupan masyarakat yang mana di dalam masyarakat itu sendiri muncul berbagai macam persoalan baru yang dijadikan inspirasi pengarang untuk menciptakan karya sastra. Dengan kata lain, karya sastra menjadi sebuah hasil kreativitas seorang pengarang yang mempunyai nilai estetik lebih sebagai tujuannya. Wellek & Warren (dalam Burhan 2002: 3) mengatakan bahwa membaca sebuah karya fiksi adalah menikmati sebuah cerita. Betapapun saratnya konflik dan pengalaman yang ditawarkan, sebuah karya fiksi haruslah tetap merupakan cerita yang menarik, dan tetap mempunyai tujuan yang estetis.

Sebagai bentuk refleksi dari realitas kehidupan masyarakat, maka akan ditemui banyak sekali pengalaman yang berbeda, bahkan belum pernah kita alami. Dalam hal ini kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap cara berpikir mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, pola pikir tidak bisa dilepaskan dari akar budaya masyarakat setempat. Itu sebabnya karya sastra bisa dimaknai berdasarkan kenyataan sosial yang terjadi pada saat karya sastra itu diciptakan. Ignas Kleden (2004) dalam pengantar buku yang disusunnya

mengatakan bahwa sebuah karya sastra tidak dapat mengelak dari kondisi masyarakat dan situasi kebudayaan tempat karya itu dihasilkan, sekalipun seorang pengarang dengan sengaja berusaha mengambil jarak dan bahkan melakukan transendensi secara sadar dari jebakan kondisi sosial dan berbagai masalah budaya yang ada di sekitarnya.

Sumardjo dan Saini (1997: 17) menyatakan bahwa sastra dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sastra imajinatif dan non imajinatif. Sastra imajinatif terdiri dari puisi, prosa, dan drama. Sedangkan sastra non imajinatif terdiri dari esai, kritik, biografi, catatan, dan surat-surat. Dalam penelitian ini, penulis tidak akan membeberkan ke dua jenis sastra tersebut. Akan tetapi lebih mengacu pada salah satu cabang dari sastra imajinatif yaitu prosa yang mengarah pada bentuk novel. Novel merupakan pengejawantahan kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra dapat merefleksikan kenyataan di sekitar kehidupan manusia dengan ruang lingkup yang lebih luas. Damono (1978: 10) berpendapat bahwa ciri khas yang terdapat dalam kebanyakan novel adalah pengarang mempunyai nilai untuk menyampaikan nilai-nilai hidup yang sangat berguna bagi pembaca. Nilai-nilai hidup ini misalnya nilai moral, nilai psikologi, nilai religius, dan masih banyak lagi nilai yang lain dan bermanfaat bagi penikmat karya sastra.

Berpijak dari pendapat tersebut, maka kajian tentang karya sastra seakan mengalami perluasan yang tidak hanya mencakup tentang unsur-unsur instrinsiknya saja, melainkan pada unsur-unsur ekstrinsiknya yaitu dengan mengacu pada sebuah kajian sosiologi sastra. Sebab kajian sosiologi sastralah

yang akan menempatkan karya sastra sebagai refleksi dari sebuah realita sosial. Melalui ilmu sosiologi sastralah diharapkan mampu memberikan petunjuk untuk memahami permasalahan sosial yang ada dalam karya sastra tersebut. Sikana (1986: 107) menyatakan bahwa pendekatan sosiologis (sosiologikal) ini melihat konfrontasi dan pertikaian yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber inspirasi penulis. Penulis bertugas mencerminkan atau menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi (di dalam masyarakat tersebut). Sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial karena mencerminkan kenyataan sosial. Artinya, walaupun bersifat fiksi karya sastra selalu dipengaruhi kejadian sosial yang melatari penciptanya.

Seorang pengarang novel disadari atau tidak tentu banyak memasukkan pengalaman orang lain ke dalam karya sastra yang dihasilkannya. Sebab, pengarang adalah anggota masyarakat yang tidak mungkin lepas dari hiruk pikuk yang terjadi di sekitar kehidupan pengarang. Hal ini akan berpengaruh terhadap karya sastra yang ditulisnya. Dengan kata lain karya sastra kemudian dibesarkan oleh konflik yang terjadi di masyarakat. Sapardi Joko Damono dalam makalahnya yang berjudul *Kita dan Sastra Dunia* berpendapat bahwa sastra merupakan tanggapan evaluatif terhadap kehidupan; sebagai cermin, sastra memantulkan kehidupan setelah menilai dan memperbaikinya (www.kunci.or.id/asia/asa-mb.pdf). Keadaan semacam ini disebabkan oleh karena adanya ketimpangan dan masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintahan tidak terlaksana dengan baik sehingga lahir karya-karya sastra yang bertemakan politik. Dalam hal ini, kemudian karya sastra dijadikan sebagai

bentuk kritik sosial. Dengan begitu maka para pengarang pun menjadikan karya sastra sebagai media untuk kritik atas kenyataan sosial atau pun politik yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai kebahagiaan manusia.

Putu Wijaya, dalam esainya yang berjudul *Sastra Sebagai Refleksi Kemanusiaan* mengemukakan bahwa sastra juga merupakan sebuah senjata. Dengan demikian, sastra bisa saja dibelokkan untuk menembak yang lain. Sastra juga bisa menjadi prajurit kemiskinan untuk memperjuangkan nasib manusia yang 'papa' agar bangkit dan menjadi seimbang dengan mereka yang gemah ripah. Sastra juga dapat menjadi alat perjuangan bagi manusia-manusia yang tertindas untuk menentang kekuasaan yang menidurinya dengan semena-mena. (<http://www.bahasa-sastra.web.id>).

Sebagaimana Putu Wijaya, Pramoedya Ananta Toer (dalam Laksana 1997: 111) mengatakan bahwa sastra bertautan erat dengan politik. Sastra tidak bisa lepas dari politik, sejak sastra itu sendiri dilahirkan oleh manusia. Ketika ada masyarakat, di situ ada kekuasaan dan di situlah ada politik.

Dalam hal ini sastra kemudian dijadikan sebagai simbol politik tertentu sekaligus untuk menyuarakan kepentingan tertentu. Inilah yang tampaknya tidak diterima oleh sebagian sastrawan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Beberapa peristiwa tersebut di antaranya yang dirasakan oleh Sobron Aidit, seorang sastrawan Indonesia yang terpaksa harus hidup di negeri menara Eifel, Perancis. Beberapa karyanya dilarang beredar di Indonesia pada masa Orde Baru. Barulah pada masa reformasi ini angin segar bagi karya-karyanya dapat ia rasakan. Selain itu, sebuah majalah

Mingguan *Tempo*, yang dimotori Goenawan Mohammad beserta kawan-kawan, juga terkena dampaknya. Pada tahun 1994, majalah tersebut tidak boleh diterbitkan karena banyak berisikan kritik dan dianggap sebagai oposisi yang merugikan rezim Soeharto yang pada waktu itu menekan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Baru setelah tahun 1998, majalah tersebut bisa kembali diterbitkan.

Novel *Tanah api* yang di tulis S. Jai lebih memfokuskan pada gambaran tokoh Kipang seorang informan menjadi semacam martir untuk menunjukkan bahwa kekuasaan politik cenderung korup, terutama saat sistem politik tidak memiliki aturan yang jelas dan segalanya bisa dinegosiasikan. Kekuasaan dan kedudukan yang mutlak dapat merubah fakta yang ada, yang kemudian bisa mengatur segala sistem kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Rasionalisasi ini banyak diungkapkan Karl Marx bahwa peran negara itu akan menindas rakyat dan korup. Sehingga Marx sendiri menawarkan negara harus dibubarkan, agar rakyat lepas dari penindasan. Aturan-aturan politik seperti ini juga akan menimbulkan bubarnya negara yang carut marut, karena rakyat tidak percaya lagi pada proses aturan main negara. Sebagaimana seperti ungkapan Hobbes, kalau negara itu kuat, rakyat akan lemah dan kalau rakyat kuat negara akan lemah. Prinsip-prinsip ini barangkali adalah ungkapan absurditas yang tidak relevan untuk diterapkan pada proses pembentukan negara seperti Indonesia.

Tokoh dalam novel *Tanah Api* Karya S. Jai adalah seorang yang berani melawan arus dominan menunjukkan kebenaran. Tokoh Kipang bersama tokoh

lainnya Wardhana melihat peristiwa demi peristiwa yang mewarnai kehidupan bangsa ini sangat menghadirkan sebuah mozaik besar yang bermuara di tanah Jakarta sebagai pusat permasalahan besar dan kebusukan tanah air negeri Indonesia. Dalam novel Tanah Api karya S. Jai juga dapat ditemukan panorama, modernitas, keglamuran, kegelapan dan kegemilangan seperti para tokoh politisi, intelektual, artis, kyai. Sebagaimana gambaran di Jakarta, bertumpuk jadi satu, ada Amin Rais yang rakus jabatan, Munir sosok penyunjang HAM, Soeharto yang otoriter, Gusdur intelektual yang genit, Iwan Fals musisi yang peka sosial, Ahmad Dani musisi yang punya karakter banci dan masih banyak tokoh-tokoh lain.

Pembaca dapat memeriksa secara seksama semua tokoh yang mewarnai Jakarta di era reformasi, dalam pentas politik dan sosial lebih cenderung dipaksa untuk meruntutkan prilaku-prilaku politik yang banyak merugikan rakyat, dengan sensasi-sensasi murahan yang di liput media cetak dan massa dengan tujuan mereduksi aksi-aksi politik kontroversi seperti kebijakan-kebijakan penguasa terhadap kepentingan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai?

- 2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala bentuk yang dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai.
- 2) Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dan politik dalam novel *Tanah Api* Karya S. Jai.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil bagi semua pihak, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan politik yang diwujudkan dalam bentuk karya sastra khususnya novel. Kemudian menyingkap sebuah realita yang terdapat dalam karya sastra terutama novel *Tanah Api* karya S. Jai yang merupakan bagian integral dari konteks sosial budaya masyarakat yang membangun karya sastra.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembaca mengenai gambaran negara Indonesia dengan segala persoalannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah kepustakaan dan menjadi

masukannya bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai masalah sosial dan politik.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1. Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata akar kata *sosio* (Yunani) (*socius* berarti bersama sama, bersatu, kawan, teman) dan logi (*logos* berarti sabda ,perumpamaan).Perkembangan tersebut mengalami perubahan makna, *soio/socious* berate masyarakat, *logi/ logos* berarti ilmu mengenai usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, ilmu pengetahuan. Sastra berasal dari kata *sas* (sansekerta) berarti mengarahkan , mengajar, member petunjuk dan intruksi. Akhiran *tra* berarti alat, sarana. Jadi sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau pengajaran yang baik. Secara Institusional objek sosiologi dan sastra adalah masyarakat, sedangkan objek objek ilmu ilmu kealaman adalah gejala gejala alam. Perbedaannya, apabila sosiolog melukiskan kehidupan manusia dan masyarakat melalui analisis ilmiah dan objektif, sastrawan mengungkapkannya melalui emosi secara subjektif dan evaluatif. Sastra memanfaatkan pikiran dan intelektualitas tetapi tetap didominasi oleh emosionalitas. Karena itu, menurut Damono (1978: 6-8), apabila ada dua orang sosiolog yang melakukan penelitian terhadap masalah suatu masyarakat yang sama maka kedua peneliti cenderung sama. Sebaliknya apabila ada dua orang seniman menulis mengenai masyarakat hasil karyanya pasti berbeda.

Sastra merupakan ungkapan perasaan masyarakat. Melalui sastra, terutama novel, kita dapat mengerti lebih banyak mengenai kehidupan manusia. Dengan

begitu, maka suatu karya sastra dapat memperkaya wawasan pembaca dengan berbagai sudut pandang seperti psikologi, sejarah, sosial, politik, dan antropologi. Dengan kata lain, segi ekstrinsik karya sastra menjadi hal yang harus diperhatikan.

Sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antarmasyarakat dengan orang-orang, antarmanusia, antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Oleh karena itu, memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia, kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah “kebenaran” penggambaran, atau yang hendak digambarkan.

Sikana (1986: 107) menyatakan bahwa pendekatan sosiologis (sosiologikal) melihat konfrontasi dan pertikaian yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber inspirasi penulis. Penulis bertugas mencerminkan atau menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi (di dalam masyarakat tersebut). Sastra dapat dipandang sebagai gejala sosial, karena mencerminkan kenyataan sosial. Oleh sebab itu, setiap karya sastra adalah ekspresi masyarakat dan kelahirannya tidak dalam kekosongan sosial. Karya sastra yang hanya merupakan tiruan dari realitas sosial, dapat menggambarkan situasi atau pergolakan masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengetahui seluk-beluk dan gambaran masyarakat.

Pengkajian sastra menggunakan pendekatan sosiologi sastra cukup beragam. Wellek dan Warren (dalam Damono 1978: 3) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam sosiologi sastra.

- a. Sosiologi pengarang, yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra.
- b. Sosiologi karya sastra, yang mempermasalahkan karya sastra itu sendiri.
- c. Sosiologi sastra, yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra.

Sebagaimana Wellek dan Warren, Ian Watt (dalam Damono 1978: 3-4) menyatakan bahwa ada tiga macam pendekatan dalam sosiologi sastra.

- a. Konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Dalam *point* ini, Sapardi juga menambahkan faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi pengarang sebagai individu di samping pengaruh yang masuk ke dalam isi karya sastranya. Hal utama yang harus diteliti dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut.
 1. Bagaimana pengarang memperoleh mata pencariannya;
 2. Sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai profesi, dan;
 3. Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang.
- b. Sastra sebagai cermin masyarakat. Yang terutama mendapat perhatian adalah:

1. Sejauh mana karya sastra mencerminkan masyarakat pada saat karya sastra itu ditulis;
 2. Sejauh mana sifat pribadi pengarang mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin disampaikannya;
 3. Sejauh mana genre sastra yang digunakan pengarang dapat dianggap mewakili masyarakat.
- c. Fungsi sosial sastra. Dalam hubungan ini ada tiga hal yang menjadi perhatian:
1. Sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak masyarakat;
 2. Sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja, dan;
 3. Sejauh mana terjadi sintesis antara kemungkinan (1) dengan (2) di atas.
- Laurenson (dalam Fananie 2000: 133) mengatakan bahwa ada tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra.
- a. Perspektif yang memandang sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan;
 - b. Perspektif yang mencerminkan situasi sosial penulisnya, dan;
 - c. Model yang dipakai karya tersebut sebagai manifestasi dari tradisi sosial budaya atau peristiwa sejarah.

Novel *Tanah Api* adalah novel yang ditulis oleh S. Jai, dibidang sastra ia menulis cerita pendek di pelbagai media. Cerpennya *Rembulan Terperangkap Ranting Dahan* terpilih sebagai pemenang ketiga sayembara

cerpen cerita panji oleh dewan kesenian jawa timur 2010. Selain novel *Tanah Api* S. Jai juga menulis novel yang berjudul *Gurah*, kemudian menulis pelbagai esai yang dipublikasikan di media cetak, baik esai budaya maupun kemasyarakatan, karena S. Jai juga berprofesi juga sebagai seorang jurnalis. Ia mendirikan sebuah teater yang bernama “Komunitas teater keluarga” sebuah kelompok teater yang merupakan kelompok intelektual di lingkungan Jalan Airlangga.

Penulis memilih novel *Tanah Api* sebagai objek penelitian karena novel tersebut lebih dominan menceritakan tentang konflik, Pergolakan-pergolakan politik yang ditampilkan merupakan konflik antara kaum elit politik dan pemerintahan yang cenderung memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mementingkan kedudukannya sendiri dengan kekuasaan yang otoriter. Dari konflik-konflik politik kemudian mengakibatkan konflik sosial pada lapisan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang didasarkan pada anggapan bahwa karya sastra merupakan cermin masyarakat, seperti yang telah disampaikan Ian Watt di atas. Dengan kata lain, kehadiran karya sastra tidak dapat terhindarkan dari hiruk-pikuk yang terjadi pada saat karya itu diciptakan.

2.2. Konflik dalam Karya Sastra

Karya sastra sebagai refleksi dari realitas sosial, sudah tentu tidak bisa dipisahkan dari konflik. Maneeke Budiman dalam esainya yang berjudul *Konflik*

Sastra dan Sastra Konflik (2003: 110) menyatakan bahwa riwayat hubungan sastra dengan konflik sama tuanya dengan usia sastra itu sendiri semenjak keberadaannya di dunia. Hubungan antara konflik dengan karya sastra merupakan sebuah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Munculnya konflik dalam karya sastra sudah ada sejak karya sastra itu ada. Konflik merupakan bagian yang sangat penting dan mutlak dalam karya sastra.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan bahwa sastra tidak berkewajiban memberitakan terjadinya suatu konflik di suatu tempat setiap waktu, terlebih lagi berkewajiban memberitakannya sebagaimana adanya. Namun, ini tidak berarti sastra steril dari konflik. Sastra kaya dengan muatan konflik, namun yang menjadi pokok persoalan adalah konflik macam apa yang ada di dalam sastra dan bagaimana konflik itu disajikan lewat sastra.

Konflik di dalam karya sastra bukan konflik mentah yang disampaikan dengan apa adanya, meskipun ada juga karya-karya sastra yang secara sadar dan sengaja menyuguhkan konflik dengan cara demikian untuk menghasilkan efek tertentu. Yang perlu diingat bahwa sastra bukanlah sebuah reportase yang menggambarkan situasi apa adanya. Dengan begitu, maka sastra tidak seutuhnya mencerminkan sebuah konflik yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

Konflik dalam karya sastra memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan sastra juga menampilkan bagaimana cara untuk menangani konflik tersebut. Dengan begitu, maka sastrawan dituntut untuk tidak hanya berkutat pada masalah gaya dan teknik penulisan saja, tetapi lebih memperhatikan pada persoalan penyajian konflik dan juga pada pemecahannya.

Hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa sastra dapat dijadikan senjata untuk mencapai perubahan.

Burhan (2002: 124) mengatakan bahwa bentuk konflik dapat dibagi ke dalam dua kategori: konflik eksternal dan konflik internal, konflik fisik dan konflik batin.

a. Konflik Eksternal

Konflik Eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang ada di luar dirinya (dengan lingkungan atau dengan lingkungan manusia).

Konflik eksternal terbagi menjadi dua kategori:

1. Konflik fisik (konflik elemental): adalah konflik yang disebabkan adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan alam.
2. Konflik sosial, sebaliknya, adalah konflik yang disebabkan adanya kontak sosial antarmanusia, atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antarmanusia.

b. Konflik internal (konflik kejiwaan), di pihak lain, adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seorang tokoh.

Konflik internal dan eksternal dalam sebuah cerita dapat terjadi dalam berbagai wujud. Dua konflik tersebut dapat menjadi konflik utama ataupun konflik tambahan atau biasa disebut konflik pendukung. Dalam sebuah cerita, konflik pendukung haruslah berkait atau mendukung konflik utama.

Paul Conn (dalam Surbakti 1992: 154) membagi konflik ke dalam dua hal yang terpenting. Ia memberikan arahan pembagian konflik pada dampak konflik terhadap arah perubahan yang dicapainya. Menurutnya, konflik terbagi ke dalam dua kategori yaitu konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik. Penyelesaian konflik politik positif ini lebih melalui jalur konstitusi dengan menggunakan mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama. Konflik negatif yang dimaksudkan adalah konflik yang mengancam eksistensi sistem politik yang ada. Pada konflik ini, mekanisme penyelesaian konflik biasanya menggunakan cara-cara yang inkonstitusional. Kudeta, revolusi, terorisme, dan bentuk-bentuk gerakan sparatisme merupakan cara-cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik negatif (Surbakti 1992: 71). Pembagian tipe konflik ini dikaitkan dengan tipe masyarakat, yakni masyarakat yang mapan dan masyarakat yang belum mapan. Kemapanan masyarakat ditentukan oleh dukungan masyarakat terhadap sistem serta pendayagunaan struktur sosial yang ada.

2.3. Pandangan tentang Konflik Sosial dan Politik

Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa konflik sudah ada sebelum manusia ada. Salah satu contoh adalah dalam sejarah kenabian Islam. Di situ dikisahkan awal penciptaan manusia oleh Tuhan yang didahului dengan konflik antara Tuhan dan Iblis (Syahputra 2006: 1).

Sejarah mencatat bahwasanya konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini, baik itu konflik antarindividu maupun antarkelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa diatasi secara adil dan proposional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antarkelompok. Dengan kata lain, munculnya sebuah konflik tidak lain karena bersinggungannya pihak satu dengan yang lain.

Konflik merupakan suatu gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konflik dengan sederhana dimaknai sebagai suatu yang bersifat alamiah dan naluriah. Artinya, konflik merupakan fenomena kemanusiaan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Konflik merupakan kodrat bagi manusia. Konflik bersifat *given* dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak heran bila kemudian kita menyaksikan ada kalanya konflik sengaja dipilih manusia secara sadar untuk menyelesaikan masalahnya.

Salert (dalam Syahputra 2006: 11) mendefinisikan konflik sebagai benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis antara struktur yang dominan dan struktur yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat, baik sumber daya politik maupun ekonomi.

Senada dengan Salert, Freud (dalam Syahputra 2006: 12) menyatakan bahwa konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan lebih, yang mengandung agresivitas dan diekspresikan. Dalam hal ini, konflik dimaknai sebagai tindakan saling serang dan mengandung unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini dipicu

karena adanya dorongan untuk saling menjatuhkan dan adanya keinginan untuk saling menguasai.

Dalam prespektif secara umum, konflik diartikan sebagai pertikaian, pertentangan atau perselisihan yang diidentikkan dengan kekerasan. Anggapan tentang konflik yang identik dengan kekerasan tersebut berawal dari pemikiran yang menganggap bahwa konflik hanya mencakup konflik fisik, seperti kerusuhan politik, pemberontakan, revolusi, dan perang antarbangsa. Dalam hal ini, konflik berarti dilibatkannya benda-benda fisik dalam menyelesaikan perbedaan tersebut.

Anggapan tersebut tidaklah salah dan juga tidak mutlak kebenarannya. Sebab ada konflik selain fisik yaitu konflik lisan. Konflik lisan terjadi bila pertentangan atau perbedaan tersebut belum sampai pada penggunaan benda-benda fisik. Konflik lisan dapat berupa debat, polemik, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya yang hanya terbatas pada saling menyerang dengan kata-kata. Dalam konteks ini, konflik dapat dipahami sebagai pertarungan memperebutkan wacana sosial, bukan memperebutkan kepentingan praktis. Syahputra (2006: 6) menyatakan bahwa konflik bukan saja terjadi di lapangan secara tajam, tetapi juga terjadi dalam ranah wacana alam pikiran publik. Setiap kelompok selalu berinteraksi, saling timpa, dan tumpang tindih memperebutkan dominasi terhadap publik.

Dalam novel *Tanah Api* konflik yang dominan adalah konflik politik. Namun demikian konflik sosial dalam novel ini juga dianalisis karena konflik politik dan konflik sosial dalam novel *Tanah Api* saling berkaitan. Oleh

karenanya, pembahasan tentang konflik sosial selalu dikaitkan dengan konflik politik begitu pula sebaliknya. Untuk itu, akan dibahas sebelumnya di dalam skripsi ini konsep-konsep tentang konflik sosial dan konflik politik dengan catatan agar lebih memudahkan dalam memahami perbedaan antara konflik sosial dan konflik politik.

2.3.1. Konflik Sosial

Dalam suatu integrasi pastilah terjadi suatu keadaan di mana antara individu maupun kelompok tersebut saling bertentangan atau terjadi ketidaksepakatan, kondisi demikian disebut dengan konflik. Konflik sosial dapat dimaknai ke dalam dua sudut pandang, yang pertama adalah bahwa konflik merupakan pertikaian terbuka seperti revolusi, pemogokan, dan gerakan perlawanan. Sudut pandang yang kedua memaknai konflik sebagai suatu hal yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosialnya.

Konflik sosial lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala penyakit dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna. Dengan kata lain, konflik sosial diyakini sebagai suatu fakta utama dalam masyarakat, baik itu masyarakat agraris maupun masyarakat modern.

Surbakti (1992: 109) mengatakan bahwa konflik terjadi karena dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kepentingan, lembaga-lembaga, organisasi, dan kelas-kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Di antara kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan

taraf kekuasaan dan wewenang. Demikian pula dengan distribusi dan alokasi sumber daya yang langka di antara kelompok-kelompok masyarakat tidak selalu seimbang. Kondisi seperti ini tidak terelakkan, sehingga konflik merupakan gejala yang senantiasa terjadi dalam masyarakat.

Simmel (dalam Soekanta, 2006: 69) berpendapat bahwa terjadinya konflik tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan.

Menurut Surbakti (1992: 18) mengingat konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, maka konflik tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya. Senada dengan Surbakti, Thomas Hobbes (dalam Soekanta, 2006: 9) menyatakan bahwa keadaan alamiah masyarakat manusia senantiasa diliputi oleh rasa takut dan terancam bahaya kematian karena kekerasan. Kehidupan manusia selalu dalam keadaan menyendiri, miskin, penuh kekotoran, dan kekerasan, serta jangka waktu kehidupan pendek. Apabila manusia dibiarkan menanggung nasibnya sendiri, maka manusia akan menjadi korban keinginan merebut kekuasaan dan keuntungan, sehingga sebetulnya manusia dikuasai oleh motif-motif untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dalam menghadapi situasi yang secara potensial mengembangkan hasrat untuk berperang dan adanya konflik, perlu diciptakan suatu organisasi dan ketertiban sosial yang dapat dipelihara dengan baik.

2.3.2. Konflik Politik

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok (Robert C. North dalam David L. Sills 1968: 226).

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah (Surbakti, 1992: 151). Secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, menentang perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik.

Dalam beberapa kasus konflik sosial bisa mengarah kepada konflik politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan yang bisa diselesaikan oleh kedua orang atau

kelompok tersebut tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah adalah konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik sosial. Akan tetapi, apabila pertentangan tersebut diselesaikan dengan keterlibatan pemerintah dan lembaga politik, maka konflik tersebut berkembang menjadi konflik politik. Demikian pula dengan pemogokan buruh akibat perselisihan dengan pengusaha. Pada umumnya pemogokan tersebut beraspek sosial dan ekonomi. Akan tetapi, bisa berubah menjadi konflik politik apabila pemogokan tersebut berkembang menjadi besar dan memiliki tuntutan politis, serta melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Gerakan-gerakan sosial yang nampak tidak punya tendensi politik terkadang memiliki tujuan politik untuk masa jangka panjang. Demikian pula dengan gerakan-gerakan intelektual seperti pendirian organisasi-organisasi intelektual yang melibatkan tokoh-tokoh yang punya sumber kekuasaan potensial bisa dijadikan sarana politik dan ada kemungkinan bisa menimbulkan konflik politik.

Konflik yang murni beraspek politik misalnya konflik di antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah. Demikian juga dengan ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pemerintah yang berkembang menjadi gerakan separatis atau pemberontakan.

Duverger dalam bukunya *Sosiologi Politik* mengungkapkan bahwa ada beberapa konsep tentang politik yang patut diperhatikan sebagai bahan kajian dalam memahami fenomena politik yang terjadi di dalam sebuah masyarakat.

Duverger membuat semacam definisi politik ke dalam struktur politik yang menurutnya terdiri dari dua bagian penting, yaitu politik dilihat dari struktur fisiknya dan politik yang dilihat dari struktur sosialnya (Duverger 2005: 31).

Struktur fisik, menurut Duverger dikaitkan pada faktor-faktor geografis dan struktur demografi. Dalam perkembangannya, faktor geografis membawa dampak yang signifikan dalam kaitannya dengan perkembangan politik suatu masyarakat. Duverger (2005: 41) memberikan sedikit gambaran tentang hal tersebut bahwa rintangan geografis yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah glasial dan wilayah-wilayah khatulistiwa merupakan penghambat bagi kemajuan dan sangat sulit bagi negara-negara tersebut untuk mengejar ketertinggalan mereka.

Duverger (2005: 55) menyatakan bahwa pada komunitas-komunitas besar cenderung menjadi birokratis. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk dapat melakukan kontak langsung dengan masyarakat secara umum dan menyeluruh. Ia menambahkan pula apabila komunitas ini semakin besar maka semakin jauh pula jarak yang diambil antara warga biasa dengan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya pergolakan politik yang dilaksanakan oleh mesin-mesin politik dan organisasi-organisasi politik yang memiliki kapasitas besar dan memanfaatkan masyarakat dengan memberikan mereka posisi yang sebenarnya abstrak.

Persoalan lain yang turut dituliskan oleh Duverger adalah distribusi penduduk. Ketidakseimbangan distribusi penduduk di dalam suatu negara mengarah kepada antagonisme (konflik) politik. Antagonisme (konflik) ini

muncul sebagai akibat ketidaksamaan di dalam pembagian perwakilan politik dalam melaksanakan kekuasaan. Urbanisasi menjadi persoalan yang sangat berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya ketegangan-ketegangan di daerah yang padat penduduknya (Duverger 2005: 75-76).

Hal kedua yang dipaparkan oleh Duverger mengenai struktur politik adalah struktur sosial. Dalam keyakinan Duverger, struktur sosial pada dasarnya lebih diarahkan pada faktor-faktor yang lebih artifisial dan yang secara hakiki manusiawi (Duverger 2005: 32). Ia kemudian membagi struktur sosial ini ke dalam tiga golongan, yaitu: keterampilan teknologi, lembaga-lembaga, dan kebudayaan.

Keterampilan teknologi didefinisikan sebagai cara-cara yang dipergunakan manusia untuk mengolah benda-benda, alat-alat, mesin, dan lain sebagainya. Pengertian lain yang diberikan Duverger bahwa keterampilan teknologi diartikan sebagai proses kolektif dari suatu kemahiran atau manufaktur khusus. Teknologi secara tidak langsung telah mengubah kehidupan sosial manusia (Duverger 2005: 79).

Kemajuan teknologi memungkinkan bagi manusia untuk dapat mengurangi permasalahan inti yang merupakan pemicu terjadinya konflik yaitu kelangkaan barang-barang konsumsi. Namun demikian masih perlu penelaahan yang lebih mendalam tentang hal ini. Dalam hal ini, Duverger menggarisbawahi bahwa asumsi ini hanya dapat dianggap benar bagi negara-negara maju. Lain halnya dengan negara-negara berkembang. Kemajuan teknologi justru menjadi persoalan baru bagi negara-negara berkembang. Beberapa ahli sosiologi

beranggapan bahwa kemajuan teknologi membawa masalah yang lebih bersifat internasional. Kemajuan teknologi menggeser orientasi pergerakan sosial yang semula merupakan perjuangan kelas kemudian menjadi perjuangan antarbangsa. Dijelaskan pula oleh Duverger (2005: 81) bahwa kemajuan teknologi melahirkan suatu istilah baru yaitu “bangsa kaya” dan “bangsa proletariat” dan di antara keduanya berkembanglah konflik. Konflik ini lebih disebabkan adanya kontak-kontak dan komunikasi antarbangsa yang semakin tinggi intensitasnya dan beberapa percobaan yang dibuat untuk memajukan bangsa-bangsa.

Perbedaan antara bangsa kaya dan bangsa proletariat ini lebih didasarkan pada perbedaan-perbedaan dalam kemajuan teknologi. Bangsa kaya adalah bangsa industri yang menggantungkan kemajuan teknologi dalam produksinya. Sedangkan bangsa proletariat lebih bersifat primitif dalam proses produksi mereka atau dengan menggunakan sebuah pengungkapan yang lebih halus dengan menggunakan metode-metode tradisional (Duverger 2005: 82).

Pelembagaan masyarakat menjadi perhatian selanjutnya dalam kaitan struktur politik yang didasarkan pada struktur sosial. Duverger memberikan sebuah pengertian lembaga sebagai model hubungan manusia yang didasarkan pada pola hubungan tersebut dengan maksud untuk mencapai stabilitas, kelangsungan, dan kohesinya. Menurut Duverger, pembahasan mengenai organisasi sangatlah kompleks. Unsur-unsur dalam lembaga, status dan peran, jenis-jenis lembaga, hubungan lembaga dengan teknologi, dan persistensi lembaga menjadi kajian di dalam kaitannya lembaga sebagai struktur sosial.

Dengan begitu dapat dirumuskan bahwa politik merupakan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dalam suatu wilayah tertentu. Dalam proses interaksi itulah akan terjadi hukum aksi reaksi, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Pemahaman ini berdasarkan atas adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan sistem politik. Surbakti (1992: 9) menyatakan bahwa masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keadaan ketidakseimbangan dan konflik.

Secara luas, konflik politik diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Sedangkan secara sempit, konflik politik diartikan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik (Surbakti 1992:151).

Lebih lanjut Surbakti membedakan konflik politik menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Konflik yang berwujud kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum mempunyai konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Misalnya huru-hara, kudeta, pembunuhan yang berdimensi politik,

separatisme, dan pemberontakan. Sedangkan konflik yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Misalnya unjuk rasa, pemogokan, dan pembangkangan sipil (Surbakti 1992: 149-150).

2.4. Penyebab Konflik Sosial dan Politik

Pada uraian sebelumnya telah disinggung secara ringkas mengenai sebab-sebab terjadinya konflik. Berikut ini adalah penjelasan tentang penyebab konflik.

2.4.1. Penyebab Konflik Sosial

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dapat terjadi karena berbagai prasangka dan sebab. Seperti, prasangka-prasangka ras, suku, agama, dan keyakinan politik atau ideologi. Selain itu adanya ketidakadilan akses pada sumber daya ekonomi dan politik memperparah berbagai prasangka yang sudah ada di antara kelompok-kelompok sosial.

Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan yang bisa diselesaikan oleh kedua orang atau kelompok tersebut tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah adalah konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik sosial. Secara umum konflik sosial disebabkan adanya sebuah kepentingan, baik antarindividu maupun antarkelompok yang berbeda-beda, yang pada akhirnya memutuskan ikatan sosial.

Soekanta (2006: 170) memberikan deskripsi tentang sebab-sebab konflik yang dituliskannya ke dalam beberapa bab. Dinamika kelompok-kelompok sosial menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik sosial. Mengingat bahwa kelompok sosial bukanlah kelompok yang statis maka di dalam perkembangannya, kelompok-kelompok sosial tersebut senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini lebih disebabkan adanya konflik antarindividu di dalam kelompok sosial itu sendiri yang membuat stabilitas kelompok sosial tersebut tergoyahkan. Dengan kata lain, pada kelompok-kelompok sosial yang stabil kemungkinan untuk terjadinya perubahan sangatlah kecil. Konflik-konflik individu ini lebih memusatkan pada keinginan dari tiap individu dalam kelompok sosial itu untuk membuat formasi atau mereformasi kelompok sosial tersebut. Keinginan-keinginan ini pada gilirannya akan berimbas pada perubahan struktur kelompok sosial tersebut.

Faktor lain yang turut memunculkan konflik adalah faktor-faktor yang datang dari luar. Dalam hal ini, Soekanta memberikan penjelasan bahwa faktor-faktor eksternal bisa berupa perubahan situasi yang dapat berupa ancaman, atau

goncangan dari dalam tubuh kelompok itu sendiri. Semisal, keluarnya salah satu anggota kelompok yang memiliki kedudukan penting dalam kelompok tersebut. Penyebab selanjutnya yang dipaparkan oleh Soekanta adalah perubahan-perubahan situasi sosial dan ekonomi. Selanjutnya, juga memberikan hipotesis mengenai kemungkinan terjadinya konflik antarkelompok. Selain itu, konflik antarkelompok menjadi suatu bahan kajian selanjutnya yang menurutnya konflik antarkelompok ini lebih disebabkan adanya persaingan antarkelompok-kelompok sosial atau juga atas sebab pemaksaan atas unsur-unsur kebudayaan tertentu.

2.4.2. Penyebab Konflik Politik

Menurut Surbakti, ada dua hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik dalam lingkup politik, yaitu kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horisontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Sedangkan kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan (Surbakti 1992: 151-152).

Lebih lanjut Surbakti menyatakan bahwa konflik terjadi manakala terdapat beturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh titik kemarahan pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik (Surbakti 1992: 152).

Duverger (2005: 174) menyatakan bahwa kemunculan konflik politik meliputi sebab-sebab individual dan sebab-sebab kolektif.

a. Sebab-sebab Individual

Sebab-sebab individual menurut Duverger, bertolak dari pendapat bahwa setiap individu harus bertempur melawan yang lain untuk kelangsungan hidup dan hanya yang paling mampu akan memenangkannya. Kecenderungan ini menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan manusia.

Dalam arena politik hal ini menjadi perjuangan untuk posisi utama. Selain itu, dalam diri manusia terdapat naluri untuk berkuasa yang dianggap sebagai kecenderungan manusiawi yang fundamental. Ambisi individual ini merupakan faktor primer di dalam konflik politik. Dalam pandangan Duverger (2005: 161) ditambahkan pula bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam bakatnya. Beberapa di antara individu memiliki keunggulan untuk dapat menggunakan bakat-bakatnya tersebut dalam memperoleh dan melaksanakan kekuasaan dan beberapa yang tidak memiliki keunggulan tersebut cenderung untuk menghalanginya. Setiap individu-individu, kelompok-kelompok sosial, atau kelas-kelas sosial yang melaksanakan kekuasaan politik selalu menjamin dirinya posisi untuk memegang kekuasaan ini.

Penyebab lain yang turut memunculkan konflik adalah apa yang disebut oleh Duverger sebagai sebab-sebab psikologis. Dalam hal ini erat kaitannya dengan naluri atas penguasaan yang lebih sering diterjemahkan sebagai nafsu *concupiscence* yang mendorong manusia untuk berbuat jahat. Duverger menambahkan pula bahwa munculnya konflik politik yang didorong faktor

psikologis lebih terfokus pada frustrasi. Dalam hal ini, dia mendeskripsikan bahwa konflik pada awalnya muncul sebagai wujud pertentangan antara tuntutan masyarakat dan keinginan untuk kesenangan yang menghasilkan frustrasi.

b. Sebab-sebab kolektif

Penyebab konflik pada tingkat kolektif, didorong oleh semakin menguatnya solidaritas kelompok sebagai akibat tekanan atau ancaman dari luar dan keinginan-keinginan perubahan yang muncul di dalam kelompok. Keyakinan akan kebenaran jalan yang ditempuh oleh kelompok akan memperkuat hubungan kelompok yang pada gilirannya akan memperkuat kedudukan kelompok tersebut dalam berkonflik dengan kelompok lainnya.

Pergolakan politik pada dasarnya meliputi dua aspek yang sangat penting. Pada satu sisi, perlawanan dapat berbentuk perlawanan antar individu. Di sisi lain, penggunaan massa, kelompok-kelompok sosial, atau komunitas-komunitas menjadi hal yang tidak dapat dielakkan sebagai realita sosial yang terjadi dalam masyarakat politik. Dalam ungkapan filosofisnya Khaldun (dalam Lauer 2003: 41) menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk politik. Dengan demikian manusia harus memiliki organisasi. Sejalan dengan itu, dalam menjalankan fungsi sosial dan politiknya manusia dihadapkan pada sebuah kondisi politik yang dinamis yang tidak jarang di dalamnya termuat konflik.

Kaum sosialis beranggapan bahwa perjuangan antarkelas adalah sebab utama bagi konflik-konflik politik. Pandangan lain yang terperinci diberikan oleh kaum konservatif yang menyatakan bahwa konflik politik mencerminkan adanya perjuangan antarras, persaingan antarbangsa, komunitas-komunitas teritorial,

kompetisi antara kelompok-kelompok yang diorganisir, dan pertempuran antarideologi.

Harus diingat pula bahwa dalam setiap sistem produksi (sistem kepemilikan) menghasilkan berbagai jenis rezim politik. Dalam hal ini pandangan Marxis mengacu pada jenis-jenis negara yang didasarkan pada sistem kelas tertentu. Pada negara demokrasi Barat, konflik biasanya termanifestasikan ke dalam partai-partai. Dengan demikian setiap kelas-kelas sosial secara bebas mengembangkan organisasinya (Duverger 2005: 205).

Paham rasis merupakan paham lain yang mengidentifikasi faktor konflik disebabkan oleh perbedaan ras. Dalam beberapa teori ras dikatakan bahwa setiap ras manusia memiliki bakat-bakat sosial dan intelektualitas yang tidak sama. Perbedaan ini dilihat dari aspek peradaban yang dilihat dari pengorganisasian masyarakat dan kemajuan teknologi yang dicapai.

Pada dasarnya konflik antarkelompok korporat ini dalam anggapan Marxis lebih bersifat kamufase. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh Duverger (2005: 243), di beberapa negara otoriter, perjuangan politik tidak dapat berlangsung secara terbuka, kamufase selalu tersembunyi di balik konflik-konflik di bidang sastra, kesenian, dan kelompok-kelompok kultural memainkan peranannya secara tidak langsung sebagai organisasi politik. Sedangkan kelompok-kelompok rekreasi yang lain juga dapat berlaku sebagai tirai bagi kegiatan politik yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini hanya akan menjadi alat-alat kelompok ideologi.

Duverger secara rinci mengklasifikasikan kelompok-kelompok ideologis ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok ideologi politik dan kelompok ideologi non-politik. Ideologi politik yang dimaksudkan adalah ideologi yang berhubungan dengan hakikat kekuasaan dan pelaksanaannya. Secara langsung ideologi politik mempunyai pengaruh terhadap perkembangan konflik politik. Pengaruh ini dapat dirasakan melalui dua cara yaitu melalui penyatuan komunitas dengan mendorong anggotanya untuk menerima kekuasaan yang memerintahnya dan dengan mengembangkan rasa kepatuhan terhadap pemerintah. Cara kedua yaitu dengan membagi suatu komunitas bilamana beberapa ideologi berada bersama.

Partai-partai merupakan kelompok-kelompok ideologis utama dari jenis politik. Kelompok-kelompok lain yang berhubungan politik tanpa memiliki orientasi pada sebarang kekuasaan seperti gerakan-gerakan perdamaian, asosiasi yang mem-bela pelucutan senjata, dan organisasi-organisasi lain.

Ideologi-ideologi non-politik adalah ideologi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kekuasaan, misalnya agama, filosofis, dan artistik. Dalam hal ini ideologi artistik adalah ideologi yang begitu jauh mengambil posisi dari kekuasaan. Adapun ideologi filosofis dan agama, dalam kenyataan berhubungan rapat dengan masalah-masalah kekuasaan. Pada tingkat tertentu ideologi non-politik ikut serta melahirkan konflik politik. Konflik ini lebih cenderung militan. Militansi ini akan menjadi semakin kuat bila ideologi tersebut semakin fundamental. Inilah yang menyebabkan keterlibatan kelompok-

kelompok agama menjadi lebih kuat dan lebih menyerap daripada kelompok-kelompok lain.

Berbeda dengan ideologi-ideologi non-politik, ideologi politik biasanya mempunyai pengaruh besar secara politik. Dalam perspektif Duverger menyatakan bahwa selama berabad-abad kekuasaan selalu mencari sanksi agama sebagai rujukan dalam menjalankan kekuasaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk menganalisis segi-segi kemasyarakatan yang ada dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai. Dalam hal ini, sosiologi sastra melihat sejauh mana karya sastra menjadi cermin dari realitas sosial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologi sastra selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori pendukung lainnya. Teori pendukung ini lebih dikaitkan pada teori-teori ilmu sosial dan politik.

Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai institusi sosial yang diciptakan pengarang sebagai anggota masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Sapardi Djoko Damono (1978). Analisis karya sastra yang menggunakan pendekatan sosiologi sastra mencoba menganalisis hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat. Sosiologi sastra juga menganalisis tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada saat karya itu diciptakan.

Sosiologi dan sastra memiliki hubungan yang erat dalam masalah objek yang digarap. Keduanya sama-sama berobjek manusia dalam masyarakat. Dengan kata lain, keduanya berguna untuk mempelajari keadaan manusia dalam masyarakat: hubungan manusia dengan keluarga, lingkungannya, politik, negara, dan sebagainya. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk analisisnya.

Sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan sastra menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Namun begitu, antara sosiologi dan sastra memiliki kemungkinan yang sama untuk terus berkembang dan mungkin juga bekerja sama.

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis dalam mengkaji konflik sosial dan konflik politik dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai ini, menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt, yang didukung dengan teori-teori ilmu sosial dan ilmu politik. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori konflik yang didasarkan pada klasifikasi konflik sosial dan konflik politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* (1992) dan Maurice Duverger dalam bukunya *Sosiologi Politik* (2005).

3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai.

Sumber data diperoleh dari keseluruhan teks yang terdapat dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai, penerbit Pustaka Sastra, tahun 2005, cetakan pertama, dan tebal 408 halaman.

Data penelitian ini berupa konflik sosial dan politik dari keseluruhan teks yang terdapat pada novel *Tanah Api* karya S. Jai.

3.3. Teknik Analisis Data

Cara kerja analisis dimulai dengan membaca keseluruhan novel *Tanah Api* secara berulang-ulang. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menemukan data mengenai konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel tersebut.

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan data dalam teks. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik sosial dan politik yang ada dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai.

. Sesuai dengan metode analisis deskripsi, unsur yang dianalisis ditekankan pada konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel tersebut, yang dikaji dengan teori sosiologi sastra, dan didukung oleh teori ilmu-ilmu sosial dan politik.

Setelah mengetahui konflik sosial dan politik yang terkandung dalam novel *Tanah Api* dan mendeskripsikannya, cara kerja berikutnya yaitu mencari penyebab terjadinya konflik tersebut. Analisis penyebab konflik ini juga dibantu dengan teori-teori sosial dan politik.

BAB IV
KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK SERTA FAKTOR
YANG MENYEBABKANNYA DALAM NOVEL *TANAH API*
KARYA S. JAI

4.1. Konflik Sosial dan Politik dalam Novel *Tanah api* Karya S. Jai

Konflik muncul ketika kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat majemuk tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Untuk itu, konflik dapat difungsikan sebagai pengontrol bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun demikian, konflik akan menjadi kian parah ketika pemenuhan kebutuhan dan kepentingan tersebut menjadi suatu ihwal yang mustahil.

Sejauh ini, beberapa teori ilmu sosial dan ilmu politik telah memberikan masukan berarti bagi pengembangan dalam penelaahan kajian-kajian konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik di beberapa negara. Menurut pandangan teori modern, kemiskinan merupakan faktor terbesar terjadinya konflik. Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Keadaan ini diperparah dengan ketidaksiapan masyarakat untuk menerima kemajuan di segala bidang. Ketidaksiapan ini kemudian dibenturkan pula dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang selalu berbeda-beda. Dengan demikian, Negara Indonesia memiliki potensi yang besar bagi kemunculan konflik baik secara sosial maupun secara politik.

Novel *Tanah Api* karya S. Jai ini membantu memahami situasi konflik sosial dan konflik politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Konflik yang

terjadi antara kaum elit politik yang berimbas pada lapisan masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada perbedaan secara tegas antara konflik sosial dan konflik politik. Kedua konflik ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, konflik sosial memiliki potensi bagi tumbuh kembangnya konflik politik, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, penulis mencoba menjelaskan konflik-konflik yang terkandung dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai ini serta penyebab yang melatarbelakanginya.

4.1.1. Konflik Sosial

Novel *Tanah Api*, merupakan salah satu novel yang menggambarkan sejarah yang memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah lain yang sarat dengan konspirasi politik. Konspirasi politik ini pun berimbas pada kehidupan sosial masyarakat, sehingga memunculkan konflik-konflik sosial yang berkepanjangan sampai saat ini.

Jenis konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik sosial antara lain konflik dalam merebut jabatan, persaingan, permusuhan, dan konflik etnis. Dalam novel ini terdapat konflik yang bisa dikategorikan sebagai konflik sosial, di antaranya adalah persaingan untuk mendapatkan pengakuan status sosial. Konflik ini tidak murni beraspek sosial akan tetapi mempunyai tendensi politik. Jenis konflik ini bisa juga ditinjau dari aspek sosial. Konflik semacam ini seringkali terjadi dalam sebuah struktur masyarakat dan biasanya disertai dengan persaingan. Dalam persaingan, biasanya disertai dengan pertikaian tidak langsung.

Konflik sosial dalam novel *Tanah Api* diawali dari cerita Ayah dan Ibu Kipang sebagai tokoh utama dalam novel. Ayahnya merupakan penduduk pribumi asli keturunan Jawa, sedangkan Ibunya merupakan seorang staf perkebunan pabrik gula yang merupakan keturunan Belanda, Ayah Kipang pada saat itu bekerja sebagai tukang jual beli informasi sedangkan Ibunya seorang yang berani terhempas dari pemerintahan kolonial Belanda dan memilih tinggal di Indonesia. Perempuan calon Ibunda Kipang tahu banyak tentang pemberontakan petani di Kertosono tahun 1907 yang melibatkan beberapa pamong. Sebagai tukang jual beli informasi Ayah Kipang berusaha mencari informasi tentang sistem pemerintahan pada saat pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya calon Ayah Kipang jatuh cinta pada calon Ibunda Kipang. Pada hakikatnya krisis sosial sudah terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam keadaan krisis sosial ekonomi justru pemerintahan pada saat itu melaksanakan kebijakan politik yang sepenuhnya membela kepentingan kapitalis dengan sama sekali mengalahkan kepentingan rakyat yang sudah sangat menderita.

“Bahkan, ia memancing agar lelaki itu mengikuti jalan pikirannya dan masuk perangkapnya. “Atau setidaknya, tidak seperti pejabat pribumi yang justru memperburuk keadaan dengan menjual dan memeras bangsa sendiri “.” (TA hal 24)

“Kebijaksanaan Kolonial hanya mengutamakan kepentingan para kapitalis. Dengan menekan biaya perusahaan perusahaan tetap meningkatkan biaya produksi Akibatnya kesejahteraan rakyat tambah merosot, karena pengurangan kemiskinan, dan beban pajak yang berat. Sebaliknya kekayaan pengusaha berat makin menumpuk.”(TA hal 30)

Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan pada saat pemerintahan Hindia Belanda cenderung kapitalis dan

tidak berpihak pada kepentingan rakyat sehingga terjadi konflik sosial antara kalangan elit pengusaha dengan rakyat kecil. Akibatnya terjadi konflik sosial dan melemahnya sistem perekonomian.

Konflik sosial masyarakat Indonesia tidak berhenti pada saat itu juga. Setelah Kipang berkeluarga ia pun mengalami hal peristiwa seperti ayahnya, Konflik tersebut terjadi antara tokoh utama Kipang yang awalnya sebagai seorang buruh pabrik di desanya memilih pergi meninggalkan pekerjaannya, bahkan ia rela meninggalkan anak dan istrinya di kampung halamannya dengan harapan mendapatkan hidup yang lebih layak setelah ia mencoba merantau ke kota besar Jakarta. Kekayaan alam yang dimiliki tanah kelahiran Kipang ternyata tidak menjadikan penduduknya kecukupan. Justru yang terjadi adalah banyak kemiskinan muncul di sana-sini. Berbagai ketimpangan sosial terus saja muncul ke permukaan. Kemiskinan, kebodohan, dan kematian selalu menjadi tontonan sehari-hari. Hal ini tidak lain karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai daerah tersebut. Pihak-pihak inilah yang senantiasa menciptakan banyak ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial yang dialami oleh Kipang yang masih menjadi buruh pabrik dan beberapa warga disebabkan oleh rendahnya upah kerja para karyawan atau lebih gampangnya para karyawan diperlakukan seperti seorang budak. Keindahan, kedamaian apalagi kemewahan tidak mungkin mereka dapat. Setiap pagi, bunyi sirine pabrik siap membangunkan para buruh yang kembali harus berhadapan dengan pekerjaannya yang tentu saja dengan tenaga ekstra. Keindahan dan kedamaian kipang hanyalah pada saat membayangkan masa

kecilnya, ketika masih anak-anak. Kipang dikempit Ayah dan Ibunya menikmati laut lepas sambil memegang kail yang sesekali disambar ikan.

Kerakusan dan keinginan yang frontal akan penguasaan telah menjadikan warga hidup dalam sebuah tekanan ekonomi yang serba kurang mengenakan dan secara perlahan telah membangkitkan terjadinya konflik sosial yang berbuntut pada perpecahan antar warga.

“Kaum duafa, makhluk lemah, orang miskin dan terbelakang, menjerit jerit, persis bunyi raungan sirine pabrik. Di tempat cerita tentang keindahan dan kedamaian begitu sulit didapat. Asap cerobong pabrik mengotori bayang-bayang perasaan itu. (hal 3)

“Kedamaian yang tak sempat mengetuk pintu rumah.” (TA hal 4)

“Bayar utang di jalan, kang?.” (TA hal 4)

“...saat ini telah menjadi seorang bapak, lelaki itu sama sekali belum pernah memperkenalkan kedamaian dan sedikit kebebasan kepada anak-anaknya, biarpun hanya memancing di tepi pantai. .” (TA hal 5)

Kipang memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dan bekerja sebagai tukang jual beli informasi yang diharapkan dapat memperbaiki hidupnya namun setelah terjun di dunia itu rasanya Kipang menemukan hal baru tentang sistem pemerintahan di Indonesia yang ternyata bobrok.

Awal kisah Kipang di Jakarta adalah ketika ia masuk pada istana negara, yang berkuasa pada saat itu adalah mantan jenderal besar yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Perlahan-lahan orang kepercayaan Tuan Presiden atau penasihat spiritualnya meninggalkannya. Tuan Presiden digambarkan sebagai tokoh yang otoriter. Kekuasaan Tuan Presiden telah membawa dampak pada

kehidupan sosial di Indonesia. Apalagi didukung dengan kebodohan dan kepincangan masyarakat yang belum mampu mengakomodir sekitarnya. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi perpolitikan yang saat itu terjadi.

Dalam penelusuran kembali sejarah ini, novel *Tanah Api* mengisahkan kembali konflik-konflik sosial yang terjadi. Konflik sosial yang terjadi lebih dikarenakan oleh faktor-faktor politis, yang berkaitan dengan kekuasaan. Perebutan kekuasaan telah mengakibatkan ketidakstabilan situasi masyarakat. Penguasa dalam hal ini Kabinet yang menyikapi ketidakstabilan itu dengan mengerahkan tentara sebagai ujung tombak bagi terciptanya stabilitas negara.

“Pak Harto benci Amien yang menjadi tangan BJ sekarang. Dia bisa menggalang masa dan punya keinginan besar. Pertengahan tahun 1997 permadi menantangnya berani tidak? Insya Allah, jawabnya !”(TA hal 36)

Skenario pak Harto *mandeg pidato* menjadi penasehat Agung yang akan main dari belakang ”bahkan kelompok kekarya akan hancur sekalipun dipindahtangkankan ke Akbar. “(TA Hal 36)

Akbar bersama 13 menteri lain memimpin suatu gerakan untuk menolak bergabung dalam Kabinet.” (TA hal 37)

Dalam petualangan tersebut Kipang menggambarkan bahwa sosok Amien adalah sosok yang haus akan jabatan. Dia terus mencatat cerita peristiwa penting seputar pemerintahan yang dianggap olehnya seperti sebuah kebobrokan, adanya upaya perebutan jabatan tersebutlah yang merupakan dampak dari sebuah konflik. Sampai pada saat itu Gus dur dilantik menjadi presiden RI yang ke 3.

“Ketika ia berdiam di Jakarta, konflik menjadi suatu yang biasa terjadi. Perang mulut, perang pernyataan antara Muslim Indonesia dan Abdurrahman Wahid hebat hebatnya. Muslim Indonesia punya keinginan Wahid Masuk, namun Wahid malah terus menuding Muslim Indonesia jadi

alat kekuasaan. Nama pak Harto masuk urutan ke-50 dari 49 nama sebenarnya.” (TA hal 33)

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lapisan sosial masyarakat tertentu yang memanfaatkan agama sebagai alat kekuasaan. Ideologi agama yang dibawa pasukan Nahdhiyin didukung perkembangannya oleh pemerintah dan pengikutnya, yang ditunjukkan diantaranya oleh Kiai asal lumajang, Parmin seorang petani cengkeh, Taji bekas sopir dari kecamatan Bandung, Lelaki Sono asal Nganjuk.

“Tetapi, wajahnya yang bersih menyiratkan ia sangat matang untuk berangkat, meskipun ia terlebih dahulu harus menjual sepeda anaknya untuk bekal.(TA hal 66)

“Kesini saya tidak membela Tuan Presiden, tetapi membela...” (TA hal 67)

“Dia rela menjual sepeda anaknya yang laku 125 ribu, sementara yang 50 ribu diminta anaknya, puteri satu satunya di Tulungagung.” (TA hal 68)

“Terpaksa Sumarso untuk berangkat ke Jakarta harus mengurangi jumlah kambingnya yang 5 ekor. Ia jual seekor yang laku 250 ribu.” (TA Hal 69)

“Begitu pulang anak saya bisa nangis ketapelnya saya hilangkan. Tapi tak mengapa, saya ganti dengan kaos.” (TA Hal 70)

Dari kutipan tersebut menandakan adanya upaya dari segolongan masyarakat yang memiliki fanatisme berlebih sampai sampai harus merelakan apa yang dimilikinya untuk dijual, hal inilah yang selanjutnya berintensitas pada konflik dalam keluarga masing masing.

Kipang menjadi saksi selanjutnya saat ia mencoba mencari informasi di kediaman mantan presiden yang juga mantan seorang Jenderal besar. Konflik sosial dalam novel *Tanah Api* juga mengenai status sosial antara bekas presiden seorang mantan jenderal. Layaknya kediaman bekas presiden penjagaannya

begitu ketat. Warga tidak boleh sembarangan lewat dengan semaunya begitu saja, mereka harus melewati penjagaan ekstra tegas dari petugas belum lagi para pembantu mantan Jenderal yang jumlahnya tidak sedikit.

“Perempuan menggendong jamu seduhan BH nya di rogo polisi. Dia tersinggung berat ketika tak ditemukan granat dari dalam BH nya. Entah sudah berapa perempuan yang dicurigai membawa granat tangan atau pistol FN menjadi korban.!” (TA hal 49)

Kantong kantong plastik isi air kencing membuat badan si Joy kurus akibat kurang selera makan. Terlebih kalau sampai *mlambang* di jok mobil. “(TA Hal 51)

Dari kutipan diatas menandakan adanya perbedaan kelas antara mantan penguasa dengan rakyat sipil. Dengan demikian, kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil telah berusaha menanamkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat.

Perbedaan kepentingan sebagaimana direfleksikan novel *Tanah Api* karya S. Jai ini termanifestasikan ke dalam bentuk perbedaan-perbedaan kepentingan individu dengan kekuasaan serta kelompok Pemerintahan. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian memicu terjadinya konflik yang termanifestasikan dalam perebutan kekuasaan.

Sikana (2001:19) dalam menyatakan, kekuasaan selalu berwajah dua. Di satu sisi memesonakan, sedang di sisi lain wajah kekuasaan nampak menakutkan. Namun demikian, secara sosiologis kehadiran kekuasaan sangat diperlukan. Soekanta (2006) mendeskripsikan, kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat netral, sehingga penilaian baik buruknya kekuasaan harus dilihat dari aspek penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Duverger (2005:199) mengingatkan,

kekuasaan bagaimanapun juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pembentukan dan pelaksanaan politik kewenangan dalam masyarakat. Sehingga terjadinya perebutan kekuasaan merupakan sebuah indikasi adanya anggapan yang menyoal ketidakmampuan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini dipicu oleh benturan-benturan antar kepentingan yang berbeda antarkelompok atau individu. Ketidakmerataan sistem distribusi kekuasaan kemudian menjadi isu yang dikembangkan sebagai acuan dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat.

. “Jaksa Agung satu ini bukan orang profesional dia terlanjur tahu politik begitu mendalam. Kalau tidak ditekan dia tidak bergerak. Dibawah tekanan sekalipun dia bisa bermain politik. Gerbong dia cukup banyak,”
(TA hal 49)

Kutipan tersebut, merupakan usaha Kipang bersama anggota tim siluman bersama Wardhana mencoba menguak kasus korupsi yang ada di bulog, mereka mendapatkan informasi dan berhasil mendapat dokumen tersebut dari seorang pejabat Negara. Tapi kekuasaanlah yang menghentikannya. Setelah sampai di tangan Jaksa dokumen rahasia tentang catatan korupsi yang menyeret beberapa nama diantaranya adalah nama bekas kepala Bulog Rahadi Ramelan tidak diproses sama sekali karena memang sengaja di tutupi oleh pihak kejaksaan kekuasaan politik cenderung korup, terutama saat sistem politik tidak memiliki aturan yang jelas dan segalanya bisa dinegosiasikan. Kekuasaan dan kedudukan yang mutlak dapat merubah fakta yang ada, yang kemudian bisa mengatur segala sistem kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Duverger (2005:67) memberikan penjelasan tentang sistem distribusi kekuasaan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan birokratisasi yang dijalankan

kekuasaan yang diseragamkan telah menciptakan jarak antara pemerintah selaku pelaksana kekuasaan dengan masyarakatnya. Pada akhirnya pelaksanaan model ini akan melahirkan budaya dominasi kekuasaan yang akan berdampak pada kesenjangan baik secara sosial maupun politik.

Konflik sosial yang digambarkan dalam novel tersebut, tentu tidak lepas dari situasi politik yang juga tergambar di dalamnya. Banyak terjadi pertentangan dalam masyarakat yang lebih mengarah pada kepentingan politik saja. Dalam hal ini, Kipang, Wardhana bersama aparaturnegara yang menjadi pihak yang paling banyak mendapat sorotan oleh pengarang. Sebab antara tokoh memunculkan konflik secara jelas. Semua tokoh berkeinginan mendapat kehidupan yang layak, tetapi jalan yang mereka tempuh sangat bertentangan. Unsur-unsur kekuasaan yang cenderung korup yang selalu dipertontonkan pemerintah menjadi pandangan tersendiri ketika mengaitkannya pada politik yang dijalankannya.

4.1.2. Konflik Politik

Konflik politik dalam novel *Tanah Api* merupakan konflik yang dominan. Konflik tersebut meliputi hampir keseluruhan cerita. Konflik tercermin dalam tema, alur, penokohan, dan latar. Analisis sosiologis dalam novel *Tanah Api* dengan mengambil konflik politik meliputi tipe konflik, struktur konflik, tujuan konflik, dan intensitas konflik.

Kipang dalam kisah ini menjadi saksi bermacam konflik politik. Dimulai dari sebuah perebutan kekuasaan di dalam tubuh kabinet yang hampir runtuh akibat situasi politik negara yang tidak stabil. Sehingga pemerintah melakukan penekanan-penekanan sebagai langkah untuk membendung perjuangan-

perjuangan kelas yang dimotori oleh orang-orang lawan politik pemerintah disinilah Kipang bersama Wardhana menjadi saksi. Amien Rais adalah sosok yang dinyatakan sebagai lawan main politik pemerintah. Dengan demikian penekanan terhadap Amien dan jaringan gerakan-gerakan politiknya menjadi barometer bagi usaha pemerintah untuk menstabilkan politik negara.

“Sangat mungkin ini peran pak Harto. Waktu itu mereka menunda memasukan nama nama calon legislatif dari kelompok kekarya lembaga pemilihan umum. Digantilah mereka. Orang orang seperti Rachmat Witoelar dicopot dan dipindahkan menjadi duta besar di Rusia. Dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penunjukan calon calon legislatif itu.” (TA hal 36)

“Menjelang tahun 1993 muncul sebuah gerakan. Sesuatu yang menarik dikisahkan BJ kepada orang orang Muslim Indonesia. Kira kira minggu ketiga bulan kedua, tepatnya tanggal 11, BJ mundur dari pencalonan Wapres. Waktu itu berhembus isu kalau BJ pada tahun 1993 jadi wapres maka pak Harto akan lengser pada tahun 1998. “(Hal 35)

“Pak Harto memaksa mencalonkan diri untuk lima tahun berikutnya, Nah dengan harapan BJ dan kelompoknya itu mampu melakukan gerpol.” (TA hal 35)

“ Amien Rais yang ketika itu masih di Yogyakarta belum menjadi ketua umum Muhammadiyah membikin musyawarah calon Presiden yang jelas sekali kriterianya ditujukan ke BJ. Lalu BJ banyak menampung Jenderal pensiunan, seperti Sayidiman dan Thoe Syafei. Tapi, khusus khusus mengenai Hartono punya ambisi sendiri untuk menjadi Wapres. Dia membikin tandingan Cides dengan CPS (Center of Politic Studies). Dia punya *move move* ingin memimpin Muslim Indonesia. (TA hal 35)

Kutipan diatas memberikan penjelasan para kaum elit politik yang berusaha saling menekan. Penekanan inilah yang kemudian menjadi sebuah budaya dominasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Penekanan-penekanan ini dengan menggunakan perangkat ormas, serta petinggi petinggi pada kursi Parlementer. Dengan langkah semacam ini, pemerintah telah menciptakan konflik baru dalam masyarakat. Ketakutan yang ditimbulkan atas

penekanan tersebut telah membuat budaya politik baru yang cenderung menjadi otoriter. Tidak hanya menggunakan otoritarianisme ala militer saja, pemerintah juga menggunakan media massa dalam rangka menekan dan memberikan semacam jargon dalam membendung gerakan-gerakan politik dan jaringan-jaringannya.

Rangkaian tragedi tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ. Usaha-usaha kaum dominasi tetap saja dilancarkan guna membendung dan membunuh karakter politik atas gerakan-gerakan lain yang berada dalam satu naungan ideologi. Pemusnahan atas perjuangan kelas digencarkan sehingga tidak ada jalan lagi bagi perjuangan-perjuangan kelas ini untuk tetap eksis dan berkembang di dalam negara..

“Upaya upaya untuk memecah Mahasiswa ketika itu sudah dimulai. Misalnya, ada isu “Anti BJ sama dengan Anti Islam” Kemudian “ Forkot adalah Komunis” mereka dianggap Kristen Katolik karena Atmajaya dari UKI. Kesan kesan ini sengaja dibangun untuk memecah belah Mahasiswa. .” (TA hal 37)

Tokoh Kipang bersama Wardhana adalah sebuah penggambaran sosok yang tidak begitu puas dengan sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah. Tekanan-tekanan yang mereka terima sebagai konsekuensi atas langkah politiknya telah memaksa mereka untuk melakukan gerakan-gerakan bawah tanah. Budaya dominasi yang dijalankan oleh pemerintah telah membuat stereotipe yang ditujukan pada dua tokoh ini, terutama tokoh Kipang yang selalu menyayangkan sikap para pemimpin yang cenderung tidak berpihak pada rakyat

lapisan bawah. Dengan demikian budaya dominasi yang digencarkan oleh pemerintah telah menciptakan kesenjangan sosial pada masyarakat.

“Terus terang aku malu pada diriku sendiri. Aku malu karena tak ada yang jujur dalam diriku. Pada saat aku bekerja mati matian berbicara tentang moral dan politik, kekayaan Negara pejabat yang korup, kemiskinan, penderitaan rakyat seolah olah begitu dekat dengan diriku, meski sebetulnya amat jauh. . “(TA Hal 135)

Kutipan tersebut menandakan bahwa Kipang bersama Wardhana mempunyai perbedaan ideologi dengan sistem pemerintah yang berjalan yang merupakan penyebab lain yang memunculkan konflik dalam novel *Tanah Api*. Perbedaan ideologi yang paling menonjol adalah perbedaan antara ideologi politik yang dijalankan pemerintah dengan ideologi tokoh Kipang yang menganggap bahwa sistem yang dijalankan pemerintah cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk menjalankan praktik korupsi.

4.1.2.1. Tipe Konflik

Tipe konflik yang terdapat dalam novel *Tanah Api* merupakan konflik negatif. Sehingga konflik yang terjadi hanya akan menjadi konflik yang berkepanjangan dan cenderung mengganggu sistem politik yang sudah ada. Pertentangan-pertentangan ideologi sistem kepemimpinan pemerintahan yang cenderung koruplah yang menjadi pemicu bagi berkembangnya konflik. Penyelesaian konflik melalui jalan konstitusi pun akan menemui kendala yang sangat berat. Hal ini disebabkan adanya kepentingan kapitalis dalam menjalankan kewenangannya selaku pengambil serta pelaksana kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar kekuasaan negara sebagai hasil konsensus.

Hal ini menunjukkan adanya sebuah ketidaksinergian antara kekuasaan dengan masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan telah kehilangan dukungannya dari masyarakat serta lemahnya pendayagunaan struktur kelembagaan negara telah membangun antagonisme masyarakat.

Duverger (2006:169) meletakkan dasar pembagian konflik atas dasar senjata serta strategi yang digunakan dalam konflik. Ia menguraikan dengan rinci dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Politik dengan memberikan beberapa poin penting serta catatan dan analisisnya tentang beberapa konflik yang terjadi diberbagai negara, termasuk negara-negara berkembang. Kekerasan fisik, kekayaan, jumlah dan organisasi dan media informasi dalam istilah Duverger merupakan senjata yang dipergunakan dalam pertempuran. Di dalam konflik senjata-senjata pertempuran menjadi tidak cukup tanpa adanya strategi politik. Dalam hal ini Duverger (2006) mengajukan beberapa poin, yaitu sebagai berikut: konsentrasi atau penyebaran senjata-senjata politik; perjuangan terbuka dan perjuangan diam-diam pergolakan di dalam rezim dan perjuangan untuk mengontrol rezim.

4.1.2.2. Struktur Konflik

Surbakti (1992: 154) membedakan struktur konflik ke dalam dua struktur, yakni konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero- sum conflict*). Konflik dengan struktur menang-kalah bersifat antagonistik yang tidak memungkinkan tercapainya kompromi antara pihak-pihak yang terkait dalam konflik. Sebaliknya, konflik menang-menang sangat memungkinkan bagi tercapainya kompromi dan kerja sama yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang bertikai sehingga pihak-pihak yang bertikai pun mendapatkan bagiannya masing-masing dalam konflik.

“ Komite reformasi gagal dibentuk, termasuk kabinet reshuffle.” (TA hal 37)

“ Ketika itu Majid diserang juga: apa itu yang namanya kompromi optimal? Termasuk Yusril Ihza, yang mengolok olok mahasiswa ketika itu.” (TA hal 137)

“ Sebenarnya kami orang-orang kalah dan selalu dikalahkan serta tidak pernah diberi kesempatan sedikit pun.” (TA hal 253)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur konflik yang tergambar dalam novel *Tanah Api* adalah menang-kalah sedangkan kompromi sebagai jalan tengah antara pihak-pihak dalam konflik tidak mungkin tercapai, sebab kuatnya sistem masing-masing pihak. Novel *Tanah Api* memberikan gambaran betapa tokoh Kipang di tengah-tengah pekerjaannya sebagai tukang jual beli informasi telah menghapus kemungkinan-kemungkinan adanya kompromi politik. Cara-cara otoriter dan cenderung korup yang digunakan kaum elit politik menimbulkan keresahan serta kebencian terhadap kelompok tersebut. Terlebih dengan terbunuhnya beberapa orang yang berseberangan dengan ideologinya. Hal ini tentu saja menyulut kemarahan dari orang-orang yang merasa tertindas dan aparat pemerintahan. Runtuhnya rezim Orde Baru, menggambarkan adanya kekalahan kekuatan dari sistem kepemimpinan yang ada.

Konflik menang-kalah pada dasarnya hanya akan memperpanjang umur konflik itu sendiri yang termanifestasikan pada konflik-konflik yang terselubung. Sehingga tidak menutup kemungkinan kemunculan konflik akan

termanifestasikan ke dalam bentuk letupan-letupan sosial. Apalagi jika sudah membawa ideologi tertentu.

4.1.2.3. Tujuan Konflik

Di dalam novel *Tanah Api* terdapat dua pihak yang terlibat dalam konflik. Pihak pertama adalah pemerintahan di bawah kabinet Soeharto kedua adalah pihak reformis. Pihak kedua merupakan pihak-pihak yang bergerak di luar kendali pemerintahan. Pihak inilah yang kemudian tidak bersetuju dengan sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuan-tujuan mereka lebih pada pergerakan moral yang mencoba menggugah kesadaran pada masyarakat dengan mengintimidasi masyarakat untuk menggerakkan reformasi. Duverger (2001:12) memberikan sebuah penggambaran umum tentang pertentangan ideologi yang terjadi dalam masa modern. Ia menegaskan bahwa pertentangan yang menjadikan ideologi sebagai alat konflik ini lebih didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai eksistensi manusia selaku makhluk sosio-ekonomi. Pada hakikatnya pihak ini tidak secara langsung bersinggungan dengan kekuasaan. Sehingga mereka merupakan pihak yang hanya memberikan penekanan terhadap kekuasaan yang sedang dirongrong oleh situasi politik yang berkembang. Mereka tidak serta merta menyertakan diri dalam perebutan kekuasaan. Gerakan bawah tanah yang mereka jalani hanya sebuah upaya untuk menghindari dari pergolakan politik yang terjadi.

Tergulingnya pemerintahan Orde Baru menjadikan kondisi semakin genting. Konflik antara kaum reformis dengan menjadi tak terelakkan. Ketidakmampuan kabinet dalam menangani konflik serta menjadi mediasi

konflik telah memperuncing konflik. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh reformis terhadap Orde Baru semakin kuat dengan memanfaatkan kelemahan kabinet ini. Di samping itu, konflik di dalam kabinet yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan telah melemahkan pemerintahan.

“ Petang hujan semakin lebat mengguyur Jakarta. Lengkap sudah Jenderal besar merasa dirinya masuk kubangan hebat bernama penjara dengan kamar kedap suara. Dia Cuma bisa mendengar ribuan jarum dan langit itu menghantam kamarnya. Lenguh, batuk berdahak, apalagi apalagi desah napas tak mampu menembus lubang lubang sempit untuk mengirim kabar ke udara. “ (TA hal 52)

“ Ya, biar sebagian dari hidupnya kembali bergairah untuk menyingkirkan lawan lawan, sudah barang tentu musuh musuh politik lamanya.” (TA hal 53)

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang tuan Jenderal besar yang dulunya pemimpin pemerintahan rezim Orde Baru runtuh, hal ini disebabkan karena adanya konflik antara kaum reformis dengan pemerintahan Orde Baru yang akhirnya Soeharto mundur dari tahta kepresidenan.

Jadi apabila disimpulkan, dalam konflik ini ada pihak yang menginginkan perubahan dan ada pihak lain yang mempertahankan sistem dan struktur sosial masyarakat yang sudah ada. Pada akhirnya konflik dimenangkan oleh pihak kedua yang berhasil menumpas rezim Orde Baru.

4.1.2.4. Intensitas Konflik

Perpecahan dalam kabinet Soeharto yang berimbas pada perebutan kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan telah memicu munculnya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mengingat kekuasaan adalah sumber yang

sangat besar dan langka maka intensitas konflik semakin meningkat ketika perebutan kekuasaan adalah faktor utama yang mengerucutkan konflik dalam bentuk-bentuk yang lebih ekstrim. Dengan demikian, setiap pihak yang bertikai akan mengerahkan segala kekuatannya dalam memenangi perebutan kekuasaan tersebut. Pihak reformis dengan penekanan-penekanan terhadap orang-orang kiri seperti Amien Rais telah melancarkan ideologi.

Intensitas konflik semakin mengerucut ketika pihak reformis dalam menjalankan operasi gerakan Pro Reformasi telah melibatkan masyarakat ke dalam situasi politik yang carut-marut. Sehingga faktor emosional masyarakatpun menjadi faktor lain yang turut serta mempertajam konflik. Ketidaknyamanan yang berdampak pada kebencian terhadap orang-orang reformis menjadikan usaha-usaha yang dilakukan oleh militer dalam memenangi pertikaian ini semakin intens.

Berikut ini adalah kutipan yang menjelaskan tentang lapisan masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan pemerintahan yang akhirnya mau masuk pada pergerakan penolakan pemerintahan.

“ Siapa yang tidak ingin marah hidup di negeri yang tidak memiliki legitimasi yang pasti. Orang-orang seperti kami yang selalu dijadikan tumbal oleh mereka yang tak boleh sedikitpun berfikir tentang negerinya. Kau juga, Sayangku, meskipun setiap hari kau berfikir, sebetulnya kau sedang tak berfikir bebas. Hanya itu saja yang kau pikirkan setiap hari. Sementara segala persoalan negeri tetap selalu membeku seperti batu di dalam tempurung kita masing-masing. “ (TA hal 256)

Keterlibatan emosional peserta konflik sangat besar. Reformis mempunyai ideologi yang sangat dipatuhi oleh setiap anggotanya. Mereka bersedia mati demi

kemuliaan tujuan. Apapun dilakukan dengan sikap patuh tanpa sedikit pun merasa gentar. Demikian juga Soeharto dengan segala cara ia bertekad untuk mempertahankan Orde Baru dengan kekerasan, sebab gerakan reformis tersebut tidak menghendaki jalan damai. Keterlibatan emosional yang besar dari pihak-pihak yang bertikai ini semakin meningkatkan intensitas konflik. Hal ini berakibat semakin besar perlawanan masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik politik. Orde Baru terus-menerus meningkatkan perlawanannya dengan menghancurkan kubu-kubu pertahanan rakyat. Pihak rakyat juga meningkatkan pertahanannya dan perlawanannya terhadap Orde Baru. Besarnya tingkat perlawanan ini juga menjadi faktor semakin intensnya konflik politik tersebut.

4.1.3. Pengaturan Konflik

Pengaturan konflik dalam novel *Tanah Api* menggunakan metode (*political violence*). Kondisi pemerintahan yang terombang-ambing telah mendorong bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan eksistensi serta sistem yang telah mereka susun. Penekanan yang diberikan oleh tentara selaku aparat negara dengan melancarkan operasi perlawanan pemerintah adalah sebuah bentuk pengaturan konflik dengan paksaan. Tujuan paksaan ini jelas sebagai upaya pemerintah dalam mempertahankan komitmen umum yaitu bentuk masyarakat lama sebagai *common value* dan mempertahankan bentuk serta sistem pemerintahan lama.

“Tanggal 20 Mei, sehari sebelum Soeharto jatuh, Akbar bersama 13 menteri lainnya memimpin suatu gerakan untuk menolak bergabung dalm kabinet.” (TA Hal 37)

Dengan demikian pengaturan konflik lebih bersifat terbuka. Pengejaran dan penangkapan bahkan pembantaian orang-orang yang bergerak bersama Reformis dan beberapa orang-orang dekat Gerakan Mahasiswa secara terang-terangan dilakukan lawan sepanjang operasi diberlakukan.

4.2. Faktor yang Menyebabkan Konflik Sosial dan Politik dalam Novel

***Tanah Api* karya S. Jai**

Berikut ini adalah penjelasan tentang faktor yang menyebabkan konflik. Pertama mengenai faktor yang menyebabkan konflik sosial dan yang kedua adalah faktor yang menyebabkan konflik politik.

4.2.1. Faktor yang menyebabkan konflik sosial

Salah satu faktor yang menyebabkan konflik sosial adalah praktik praktik korupsi yang dilakukan para penguasa. Secara hakiki korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat. Korupsi yang kian subur akan semakin membuat beban devisa anggaran negara semakin bertambah. Hal ini kemudian akan mengakibatkan sistem ekonomi menjadi lemah dan berujung kepada semakin tingginya inflasi yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat kian melambung tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara daya beli masyarakat dengan tingkat harga komoditas terutama komoditas bahan pokok. Masyarakat cenderung dipaksa untuk menerima keadaan ini, meski ambuknya sistem ekonomi Indonesia adalah akibat dari ulah para pejabat yang mengkorupsi uang negara demi kepentingan

pribadi, kelompok dan golongan masing-masing. Masyarakat dipaksa untuk menanggung beban yang tidak dilakukannya.

Pada zaman penjajahan, praktik korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa Indonesia. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial Belanda. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia.

“Di tempat perkebunan tembakau, tebu, karet, dan kopi yang jauh lebih luas dari tanahnya tuannya di Belanda” (TA Hal 21)

“Ada kuli ada majikan, cerita palsu, penduduk asli yang diperintahkan memburu pelarian kontrak.” (TA Hal 21)

“Untuk kepentingan kaum kapitalis asing, pajak ekspor minyak tanah dihapuskan dan pajak industri gula dikurangi. Padahal keduanya berjumlah kira kira 100 juta Gulden.” (TA Hal 23)

“Ingat, pada abad ke-18 republik Belanda memperbesar korupsi.”(TA Hal 25)

Beberapa kutipan tersebut menyiratkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di bawah tekanan para penjajah karena kekuasaan yang berimbas pada rakyat. Rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengelola dan mengolah sumber-sumber ekonomi secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya penguasaan atas sumber-sumber ekonomi masyarakat penjajah.

Konflik tidak berhenti pada saat itu juga, pada kenyataan bahwa reformasi yang berlangsung tidak menunjukkan hadirnya efektivitas penggunaan kekuasaan, perubahan atau pembangunan politik, kecuali pada perspektif perebutan kekuasaan. Dalam fokus politik makro lebih didominasi pada hubungan antar aktor-aktor politik. Bahkan secara keseluruhan politik Indonesia masih terkonsentrasi pada kepentingan Negara dibanding pada kepentingan masyarakat atau rakyat.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan konflik pada novel *Tanah Api* adalah adalah kekuasaan atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktek korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama. Sama persis dengan praktek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto, pemerintah dengan begitu mudahnya menghisap pajak dan uang rakyat atas nama dan untuk pembangunan. Siapa yang menghalang-halangi, dicap sebagai anti pemerintah, membahayakan stabilitas negara. Praktek korupsi di pemerintahan tidak berhenti pada saat tumbangnya rezim Orde baru saja bahkan sampai pada kabinet reformasipun masih ada praktik korupsi, berikut ini adalah kutipan yang menandakan praktik korupsi di kalangan pemerintahan.

“Nama bekas Kepala Bulog Rahadi Ramelan dicatat paling atas yang diduga korupsi 50,8 rupiah tertanggal 21 dan 22 april 1999. Deretan kedua adalah nama Beddu Amang, tersangka korupsi mencapai 2,007 triliun dilakukan per tanggal 29 february 1999. Daftar nama rekanan yang masuk dalam surat itu ada keluarga Soeharto, Rejosari Agung, Purna Bakti Pertiwi, Hokiarto, Busatanil Arifin, Wijaya Kusuma, Brigjen Sugiono, Zawawi, Goro Batara Sakti,

Radiyana, Bustan Jufri, Sweet Indo Lampung, Salim, Gula Putih Mataram, Indo Putra Leasing, Bank Duta, Bank Bukopin, Ramedia Indah, Mitra Bahtera, Indo Futura, Dwipa Mina...” (TA Hal 115)

“Persis di bawahnya, di pinggir kiri dokumen itu dengan huruf huruf amat kecil tertulis. *Penjarahan RS (Raw sugar) sebanyak 800 ton dan BR (brow rice) sebanyak 40.655 ton merupakan kerugian bulog.*” (TA hal 172)

“*Rp50.800.000.000 dikeluarkan berdasarkan perintah Kabulog Rahadi Ramelan dengan keterangan “untuk keperluan kenegaraan”.*” (TA hal 172)

Secara sosiologis kecenderungan korupsi yang menyebar dan menjamur dikalangan masyarakat umum, juga tidak lepas dari bangunan kekuasaan yang dipraktekkan oleh Orde Baru Soeharto. Pemikiran masyarakat telah secara otomatis terhegemoni dan tercekoki oleh lingkungan sosial yang terbentuk dari bangunan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter.

Kalau hidup di masyarakat yang terjajah, kau harus bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran kolektif untuk melawan kolonialis sehingga bangsamu dapat mengambil sikap tegas melawan kekuatan kolonialis.” (TA hal 95)

Tokoh Kipang dalam novel tersebut menggambarkan sebuah petualangan tentang kebijakan pemerintah Sejak pemerintahan orde lama hingga orde reformasi ini, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada Presiden masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan sehingga menjadikan mereka seperti Namun tiap-tiap masa pemerintahan mempunyai cirinya masing-masing dalam menjalankan arah kebijakan anggaran negara. Hal ini dikarenakan untuk disesuaikan dengan kondisi stabilitas politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban. Kebijakan anggaran negara yang diterapkan

pemerintah selama ini sepertinya berorientasi pada ekonomi masyarakat. Padahal kenyataannya kebijakan yang ada hanya untuk segelintir orang dan bahkan lebih banyak menyengsarakan rakyat. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang hanya menambah beban rakyat.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas faktor yang menyenankan terjadinya konflik sosial yang dialami oleh Kipang melalui sebuah petualangan. Dari petualangan yang panjang inilah kipang tidak pernah menemukan kedamaian, apalagi sebuah kejujuran dan keterbukaan para aparatur pemerintah yang jelas jelas memperkaya dirinya sendiri untuk kepentingan golongannya.

4.2.2. Faktor yang menyebabkan konflik politik

Soekanta (2006:91-92) menggarisbawahi bahwa penyebab terjadinya konflik mengakar pada perbedaan-perbedaan baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perbedaan kepentingan dan budaya serta disokong pula dengan adanya perubahan sosial. Kondisi yang semacam inilah yang memungkinkan adanya kemajemukan baik secara kultural maupun sosial masyarakat. Kemajemukan sosial dan kultural ini dikategorikan sebagai kemajemukan horisontal (Surbakti 1992:151). Di samping kemajemukan horisontal, kemajemukan vertikal juga merupakan kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik. Kondisi ini ditandai dengan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan horisontal menjadi penyebab terjadinya konflik karena pada kondisi ini setiap entitas baik sosial maupun kultural berupaya menunjukkan dan mempertahankan eksistensinya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya oleh

Soekanta bahwa di dalam mempertahankan entitas-entitas ini akan menemui benturan dalam bentuk perbedaan-perbedaan kepentingan bahkan memiliki kecenderungan untuk saling bertentangan. Kemajemukan vertikal di dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik karena adanya perbedaan dalam kepemilikan kekayaan dan kekuasaan. Namun demikian, konflik terjadi sebagai akibat dari perebutan sumber-sumber yang sama.

Sebab pertama yang mengawali novel ini adalah perbedaan kepentingan antara kelompok mayoritas yang dalam istilah Duverger dikatakan sebagai penguasa dengan kelompok minoritas atau kelompok sosial yang tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Letak perbedaan yang menciptakan konflik adalah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan penguasa sebagai upaya pemerintah dalam pembangunan yang tidak mengindahkan faktor masyarakat. Penguasa lebih memprioritaskan pembangunan dari perspektif aspek nilai ekonomi yang sangat praktis. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya pelaksanaan kebijakan penguasa tidak hanya menggeser perikehidupan masyarakat yang terlepas dari faktor-faktor historisnya tetapi juga telah mengubah perilaku sosial masyarakat.

Perbedaan kepentingan sebagaimana direfleksikan dalam novel ini termanifestasikan ke dalam bentuk perbedaan-perbedaan kepentingan Reformis dengan kekuasaan Orde Baru. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian memicu terjadinya konflik yang termanifestasikan dalam perebutan kekuasaan.

Surbakti (1992:23) menyatakan, kekuasaan selalu berwajah dua. Di satu sisi memesonakan, sedang di sisi lain wajah kekuasaan nampak menakutkan.

Namun demikian, secara sosiologis kehadiran kekuasaan sangat diperlukan. Soekanta (2006) mendeskripsikan, kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat netral, sehingga penilaian baik buruknya kekuasaan harus dilihat dari aspek penggunaannya bagi keperluan masyarakat Surbakti (2004:199) mengingatkan, kekuasaan bagaimanapun juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pembentukan dan pelaksanaan politik kewenangan dalam masyarakat. Bila dikaitkan dengan novel *Tanah Api* terjadinya perebutan kekuasaan merupakan sebuah indikasi adanya anggapan yang menyoal ketidakmampuan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini dipicu oleh benturan-benturan antarkepentingan yang berbeda antarkelompok atau individu sehingga munculah golongan yang tidak puas dengan pemerintahan dari lapisan masyarakat paling bawah sekalipun.

“Tolong bantu aku mengurangi jumlah manusia yang terbunuh oleh demokrasi, Di ujung malam itu, laki laki pemabuk, setiap laki laki di setiap bangsa tak pernah bertemu dalam satu muara. Demokrasi itu hanya dimiliki oleh penguasa yang mampu mengelabui anak anak bangsa, yang katanya pewaris negeri ini. Sementara nilai nilai demokrasi yang dimiliki penguasa adalah kebobrokan untuk menutupi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri.” Anak anak bangsa selalu dipaksa untuk mewarisi nilai-nilai yang tidak pernah dimengerti, bagaimana negeri ini bisa hidup dan dapat dibanggakan. Mustahil” Imbuhnya ringkas.” (TA hal 259)

“Tuhan, dunia dengan tubuh tua keriput ini sungguh terbalik. Tuhan melindungi sekelompok sindikat. Dengan apa dia jalankan kekuasaan? Tidur? Suara kawan-an burung malam terus nyanyi meledek polisi dengan syair-syair liar.” (TA hal 265)

Kutipan tersebut sedikitnya telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang sebuah kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini novel *Tanah Api* mencoba

mengungkapkan adanya konflik yang ditimbulkan nilai nilai demokrasi sebagai proses perubahan sosial masyarakat.

Duverger (2004:87) memberikan penjelasan tentang sistem distribusi kekuasaan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan birokratisasi yang dijalankan kekuasaan yang diseragamkan telah menciptakan jarak antara pemerintah selaku pelaksana kekuasaan dengan masyarakatnya. Pada akhirnya pelaksanaan model ini akan melahirkan budaya dominasi kekuasaan yang akan berdampak pada kesenjangan baik secara sosial maupun politik.

Soekanta (2006:35) memberikan beberapa poin penting berkaitan dengan unsur-unsur saluran kekuasaan. Menurut Soekanto, unsur-unsur politik dalam kekuasaan dapat berupa: rasa takut, rasa cinta, kepercayaan dan pemujaan. Sedang dalam pelaksanaan kekuasaan dapat dilakukan melalui saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan saluran-saluran lain seperti media komunikasi.

Pandangan Soekanta tersebut apabila dikaitkan dengan konflik yang tergambar dalam novel *Tanah Api*, maka akan ditemui bahwa kekuasaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru dijalankan atas dasar unsur rasa takut.

“Tanggal 20 Mei, sehari sebelum Soeharto jatuh, Akbar bersama 13 menteri lain memimpin suatu gerakan untuk bergabung ke dalam kabinet ” (TA Hal 37)

” Penolakan menteri menteri di jadikan dalih pak Harto yang gagal memimpin reshafle kabinet” (TA Hal 37)

Kutipan tersebut memberikan gambaran pula bahwa kekuasaan yang didasari rasa takut telah membuat pola-pola penekanan yang sebagai cara untuk memberangus lawan-lawan politik penguasa.

Perbedaan ideologi merupakan penyebab lain yang memunculkan konflik dalam novel *Tanah Api*. Perbedaan ideologi yang paling menonjol adalah perbedaan antara ideologi politik yang dijalankan pemerintah dengan ideologi tokoh reformasi yang menginginkan adanya perubahan. Dalam hal ini ideologi kemudian dijadikan senjata ampuh bagi pihak-pihak yang terkait dengan konflik.

Kleden (2004:12) dalam *Esai Esai Sastra dan Budaya* mengemukakan, ideologi muncul oleh sebab ketidakpuasan mengenai kondisi ekonomi, politik dan sosial. Pendapat yang dikemukakan Kleden ini memberikan arahan pada kita bahwa ideologi merupakan sebuah respon kritis yang diberikan kelompok-kelompok tertentu yang tidak merasa puas dengan kebijakan politik penguasa. Ketidakpuasan ini muncul oleh sebab tidak terakomodirnya kepentingan kelompok atau individu tersebut.

Dalam novel ini terlihat jelas bahwa kaum reformis tidak puas dengan kinerja orde baru yang dianggap gagal menjalankan pemerintahan, sehingga munculah gerakan gerakan yang dinamakan gerakan pro reformasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Novel *Tanah Api* memulihkan kembali ingatan kita pada sebuah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam rentang waktu yang panjang novel karya S. Jai mencoba menelisik dan menelusuri pergulatan sosial dan politik yang pernah mewarnai dunia politik Indonesia. Beberapa catatan kecil mengenai peristiwa-peristiwa sejarah terekam di dalamnya.

Tokoh Kipang bersama tokoh Wardhana melihat peristiwa demi peristiwa yang mewarnai kehidupan bangsa ini sangat menghadirkan sebuah mozaik besar yang bermuara di tanah Jakarta sebagai pusat permasalahan besar dan kebusukan tanah air negeri Indonesia. Dalam novel *Tanah Api* karya S. Jai juga dapat ditemukan panorama, modernitas, keglamoran, kegelapan dan kegemilangan seperti para tokoh politisi, intelektual. Seperti gambaran di Jakarta, bertumpuk jadi satu, ada Amin Rais yang rakus jabatan, Jaksa Agung, pelacur, dan masih banyak tokoh-tokoh lain. Melalui gambaran tokoh tersebutlah konflik antar kaum elit politik dan para pejabat pemerintahan terjadi yang kemudian menimbulkan konflik sosial pada lapisan masyarakat di Indonesia.

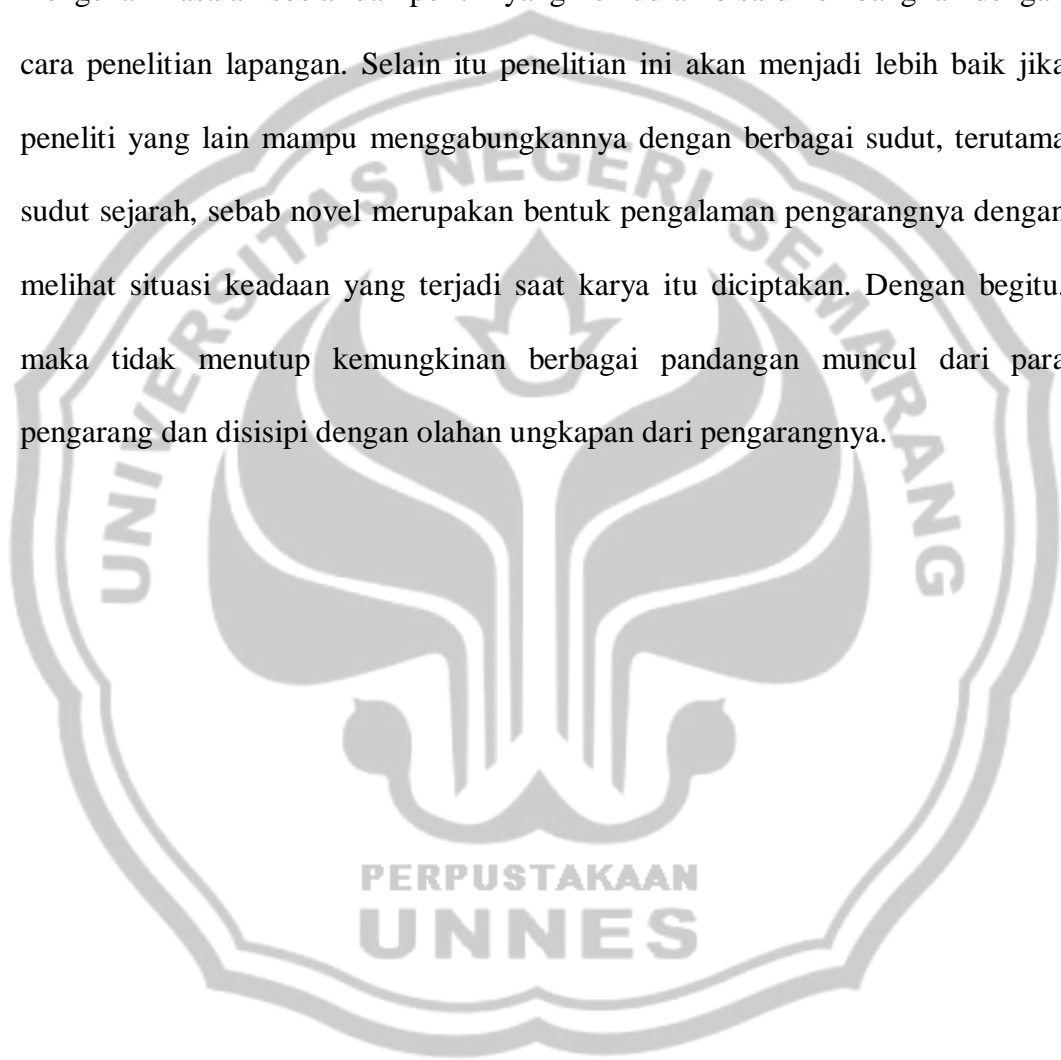
Konflik yang ditampilkan dalam novel *Tanah Api* merupakan konflik antara kaum elit politik dan pemerintahan yang cenderung memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mementingkan kedudukannya sendiri dengan kekuasaan yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto pada saat itu harus tumbang karena adanya pergerakan reformasi. Tumbangnya

pemerintahan Orde Baru tidak serta merta mengubah Indonesia menjadi lebih baik, akan tetapi praktik-praktik korupsi masih saja ada pada era reformasi. Kipang yang bekerja sebagai tukang jual beli informasi berani melawan arus dominan lewat perjuangannya bersama Wardhana. Ia berusaha membongkar beberapa kasus korupsi yang ada pada beberapa departemen, namun semuanya kalah oleh tangan kekuasaan yang tidak ingin menghendaki adanya suatu kebenaran dan kejujuran. Kekuasaanlah yang menghentikan usaha Kipang dan Wardhana, sampai mereka sadar bahwa tanah yang mereka pijak tidak ubahnya seperti tanah api, mereka sulit sekali menemukan kejujuran para pejabat dari orde baru sampai pada era reformasi.

Faktor yang menyebabkan konflik konflik pada novel *Tanah Api* adalah kekuasaan atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi, betapa mudahnya praktik korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama. Sama persis dengan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan orde baru Soeharto. Pemerintah dengan begitu mudahnya menghisap pajak dan uang rakyat. Perbedaan ideologi merupakan penyebab lain yang memunculkan konflik dalam novel *Tanah Api*. Perbedaan ideologi yang paling menonjol adalah perbedaan antara ideologi politik yang dijalankan pemerintah dengan ideologi tokoh reformasi yang menginginkan adanya perubahan. Dalam hal ini ideologi kemudian dijadikan senjata ampuh bagi pihak-pihak yang terkait dengan konflik. Semua kejadian tersebut tercatat oleh Kipang bersama Wardhana.

5.2. Saran

Dengan adanya novel *Tanah Api* karya S. Jai, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dinamika sosial dan politik yang ada di Indonesia serta penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk penelitian mengenai masalah sosial dan politik yang kemudian bisa dikembangkan dengan cara penelitian lapangan. Selain itu penelitian ini akan menjadi lebih baik jika peneliti yang lain mampu menggabungkannya dengan berbagai sudut, terutama sudut sejarah, sebab novel merupakan bentuk pengalaman pengarangnya dengan melihat situasi keadaan yang terjadi saat karya itu diciptakan. Dengan begitu, maka tidak menutup kemungkinan berbagai pandangan muncul dari para pengarang dan disisipi dengan olahan ungkapan dari pengarangnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Manneke, dkk. 2003. *Sastra Kota (Bunga Rampai Esai Temu Sastra Jakarta)*. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pustaka Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- _____. 2003. *Kita dan Sastra Dunia*. (Makalah). Available at www.kunci.or.id/asia/asa-mb.pdf. diunduh pada 3 mei 2010.
- Duverger, Maurice. 2005. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fanie, Zainuddin. 2000. *Telaah Sastra*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Jai, S. 2005. *Tanah Api*. Yogyakarta: Pustaka Sastra
- Kleden, Ignas. 2004. *Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan; Esai-esai Sastra dan Budaya*. Jakarta: Grafiti.
- Kurniawan, Eka. 2006. *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laksana, A.S. 1997. *Polemik Hadiah Magsaysay*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Lauer, Robert H. 2003. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lenin, W.I. 1998. *Sosialisme dan Agama*. <http://www.geocities.com/indomarxist/vi050019.htm>. diunduh pada 3 mei 2010
- Nurgiyantoro, Burhan. 2002. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada Perss.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2003. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sikana, Mana. 1986. *Kritikan Sastera: Pendekatan dan Kaedah*. Bandung: Petaling Jaya.
- Soekanta, Soerjono. 1988. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardjo, Jakob dan Saini. 1997. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Teeuw, A. 1997. *Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramoedya Ananta Toer*. Jakarta: Dunia Pustaka.
- Wijaya, Putu. 2002. *Sastra Sebagai Refleksi Kemanusiaan*. Artikel. Available at. http://www.bahasa_sastra.web.id. diunduh pada 10 mei 2010.

LAMPIRAN



Lampiran

Sinopsis Novel *Tanah Api* karya S. Jai

Tokoh utama dalam Novel *Tanah Api* adalah Kipang. Kipang lahir dari seorang Ayah yang merupakan penduduk pribumi asli keturunan Jawa, sedangkan Ibunya merupakan seorang staf perkebunan pabrik gula keturunan Belanda. Ayah Kipang pada saat itu bekerja sebagai tukang jual beli informasi sedangkan Ibunya seorang yang berani terhempas dari pemerintahan kolonial Belanda dan memilih tinggal di Indonesia. Ibunda Kipang mengetahui banyak tentang pemberontakan petani di Kertosono tahun 1907 yang melibatkan beberapa pamong. Sebagai tukang jual beli informasi Ayah Kipang berusaha mencari informasi tentang sistem pemerintahan pada saat pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya Ayah Kipang menikah dengan Ibunda Kipang dan melahirkan tiga orang anak, Kipang adalah anak kedua dari tiga bersaudara, ia mempunyai seorang kakak dan seorang adik.

Setelah berkeluarga Kipang bekerja sebagai buruh pabrik. Sebagai seorang buruh ia merasa hidupnya menderita karena ia tetap hidup miskin bahkan Kipang merasakan hidupnya semakin menderita karena ia mengetahui bahwa para staf pabrik memperlakuka Kipang seperti seorang budak. Sumber kekayaan yang dimiliki daerahnya ternyata tidak memperbaiki kesejahteraan masyarakat daerahnya akan tetapi mereka hanya dijadikan buruh. Kemudian Kipang memilih pergi dari kampung halamannya dan memilih meninggalkan pekerjaannya, dengan harapan hidupnya akan menjadi lebih baik. Kipang pergi ke Jakarta yang merupakan kota besar kota yang menjadi pusat perekonomian Indonesia.

Kipang bekerja sebagai tukang jual beli informasi. Peristiwa yang dicatat oleh Kipang merupakan petualangan yang panjang. Ia mencatat peristiwa melalui sebuah petualangan panjang. Awal kisah Kipang di Jakarta adalah ketika ia masuk pada istana negara, yang berkuasa pada saat itu adalah mantan jenderal besar yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Perlahan orang kepercayaan Tuan Presiden atau penasihat spiritualnya meninggalkannya. Tuan Presiden di digambarkan sebagai tokoh yang otoriter. Kekuasaan tuan Presiden

telah membawa dampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Apalagi didukung dengan kebodohan dan kepincangan masyarakat yang belum mampu mengakomodir sekitarnya. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi perpolitikan yang saat itu terjadi. Peristiwa tersebutlah yang terekam oleh Kipang dan disimpan dalam sebuah catatannya yang rapi. Kipang beranggapan bahwa zaman telah dikutuk oleh rakyat, karena ketimpangan sosial, agama dan politik telah dinodai oleh rezim yang memimpin, sehingga terjadi kekacauan yang meluas di mana-mana.

Dalam perjalanannya ia bertemu dengan Wardhana yang juga merupakan seorang calo informasi. Kipang dalam kisah ini menjadi saksi bermacam konflik politik. Dimulai dari sebuah perebutan kekuasaan di dalam tubuh kabinet yang hampir runtuh akibat situasi politik negara yang tidak stabil. Sehingga pemerintah melakukan penekanan-penekanan sebagai langkah untuk membendung perjuangan kelas yang dimotori oleh orang-orang lawan politik pemerintah disinilah Kipang bersama Wardhana menjadi saksi. Amien Rais adalah sosok yang dinyatakan sebagai lawan main politik pemerintah. Amien Rais dengan gerakan yang dinamakan gerakan pro reformasi berhasil menumbangkan rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Setelah runtuhnya orde baru lahirlah kabinet reformasi, pada kenyataan bahwa reformasi yang berlangsung tidak menunjukkan hadirnya efektivitas penggunaan kekuasaan, perubahan atau pembangunan politik, secara keseluruhan politik Indonesia masih terkonsentrasi pada kepentingan negara dibanding pada kepentingan masyarakat atau rakyat. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjamur. Kipang bersama anggota tim siluman bersama Wardhana mencoba menguak kasus korupsi yang ada di bulog, mereka mendapatkan informasi dan berhasil mendapat dokumen tersebut dari seorang pejabat Negara, tapi kekuasaanlah yang menghentikannya. Setelah sampai di tangan Jaksa dokumen rahasia tentang catatan korupsi yang menyeret beberapa nama diantaranya adalah nama bekas kepala Bulog Rahadi Ramelan tidak diproses sama sekali karena memang sengaja di tutupi oleh pihak kejaksaan kekuasaan politik cenderung korup, terutama saat sistem politik tidak memiliki aturan yang

jelas dan segalanya bisa dinegosiasikan. Kekuasaan dan kedudukan yang mutlak dapat merubah fakta yang ada, yang kemudian bisa mengatur segala sistem kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Demikian cerita Tanah Api yang dilakokan Kipang dalam pengembaraan untuk menumpas kejahatan, sebagai korban anarkisme penguasa, hingga akhirnya ketidakadilan menimpa dirinya, ia menjadi korban dari ganasnya realitas, sehingga tidak mampu mempertahankan kekokohan hidupnya. Karena itu ia menjadi sepele korban di negeri yang hilang, walaupun ia berusaha keras untuk melawan hegemoni rezim otoriter dan korup untuk dihilangkan dari keberadaannya.